

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBERDAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

MEMORANDUM
Nomor 140/BRSDM.2/TU.140/IV/2023

Yth. : Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia KP
Dari : Kepala Pusat Riset Kelautan
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja (LKj) Pusriskel Triwulan I Tahun 2023
Lampiran : Satu Berkas
Tanggal : 18 April 2023

Bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja (LKj) Pusat Riset Kelautan Triwulan I Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

Demikian kami disampaikan, mohon arahan Bapak lebih lanjut. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
secara elektronik

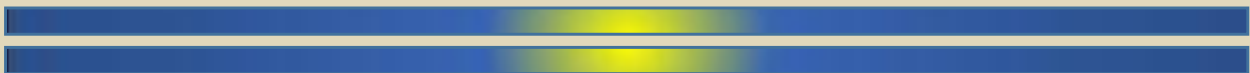
Hendra Yusran Siry

Tembusan :
- Sekretaris BRSDM



LAPORAN KINERJA PUSAT RISET KELAUTAN

TRIWULAN I
2023



**PUSAT RISET KELAUTAN
BADAN RISET DAN SUMBERDAYA MANUSIA**

Puji dan Syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, karena atas Izin dan Rahmat-Nya penyusunan "Laporan Kinerja Pusat Riset Kelautan Triwulan I Tahun 2023" dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Pusat Riset Kelautan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka terselenggaranya *good governance*.

Laporan ini menyajikan kinerja organisasi Pusat Riset Kelautan selama Triwulan I Tahun 2023. Metode penyajian kinerja mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja ini memberikan informasi capaian kinerja Pusat Riset Kelautan pada Triwulan I Tahun 2023 dan diharapkan menjadi bahan perbaikan bagi Pusat Riset Kelautan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya pada periode berikutnya. Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Pusat Riset Kelautan - BRSDM telah menerapkan metode pengukuran kinerja berbasis *Balanced Score Card* (BSC). Kinerja Pusat Riset Kelautan diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Pusat Riset Kelautan Tahun 2023 yang merupakan kontrak kinerja tahunan.

Selanjutnya, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh atas capaian kinerja Level 2 Pusat Riset Kelautan Triwulan I Tahun 2023 yang meliputi capaian kinerja kegiatan lingkup Pusat Riset Kelautan. Capaian kinerja tersebut dikontribusi oleh 3 satuan kerja (satker) yang berada di lingkup Pusriskel yaitu satker Pusriskel, satker Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) – Bungus, dan satker Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LPTK) – Wakatobi.

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kontribusi dan sumbangsih semua pihak yang turut mendukung pencapaian

kinerja Pusat Riset Kelautan pada Triwulan I Tahun 2023. Akhirnya, semoga laporan ini memberikan manfaat dan digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan dan tahun berikutnya.

Jakarta, 18 April 2023

Kepala Pusat Riset Kelautan



Ditandatangani
secara elektronik

Hendra Yusran Siry

Daftar Isi

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	4
Daftar Gambar	5
Daftar Tabel	6
Ringkasan Eksekutif.....	7
BAB I PENDAHULUAN.....	9
A. <i>Latar Belakang</i>	<i>10</i>
B. <i>Tugas, Fungsi, & Struktur Organisasi</i>	<i>13</i>
C. <i>Keragaan Sumber Daya Manusia (SDM).....</i>	<i>17</i>
D. <i>Sistematika Laporan Kinerja (LKj).....</i>	<i>18</i>
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
A. <i>Rencana Strategis Pusriskel 2020-2024</i>	<i>21</i>
B. <i>Potensi dan Permasalahan.....</i>	<i>25</i>
C. <i>Rencana Kerja Tahunan 2023.....</i>	<i>27</i>
D. <i>Perjanjian Kinerja Tahun 2023</i>	<i>29</i>
E. <i>Pengukuran Kinerja</i>	<i>30</i>
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	33
A. <i>Prestasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023</i>	<i>34</i>
B. <i>Evaluasi dan Analisis Kinerja</i>	<i>34</i>
C. <i>Akuntabilitas Keuangan Tahun 2023</i>	<i>41</i>
D. <i>Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya</i>	<i>43</i>
BAB IV PENUTUP	45
A. <i>Capaian Kinerja Utama</i>	<i>46</i>
B. <i>Permasalahan dan Rekomendasi.....</i>	<i>47</i>
LAMPIRAN	48

Daftar Gambar

Gambar 1. Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024.....	11
Gambar 2. Sebaran Pegawai berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan	18
Gambar 3. Satker UPT Pusriskel.....	26
Gambar 4. Pagu Anggaran Lingkup Pusriskel Tahun 2023.....	28
Gambar 5. Postur Anggaran Pusriskel Tahun 2023.....	28
Gambar 6. Indeks Capaian IKU	31
Gambar 7. Nilai Capaian Kinerja Pusriskel tahun 2023	34
Gambar 8. Nilai Efisiensi anggaran Triwulan I Tahun 2023	44

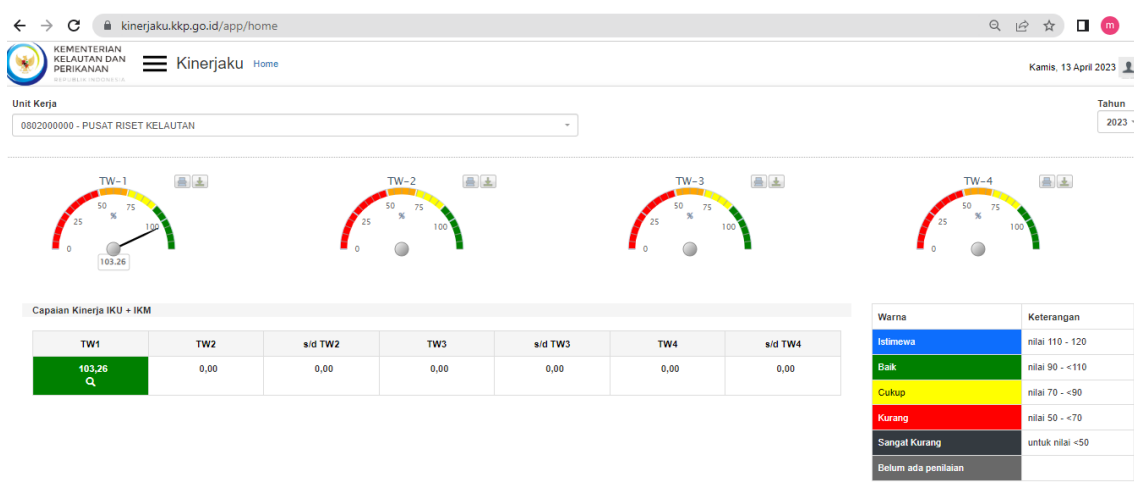
Daftar Tabel

Tabel 1. Distribusi Pegawai Lingkup Pusat Riset Kelautan.....	17
Tabel 2. Sasaran Kegiatan Pusriskel.....	22
Tabel 3. Rencana Kinerja Tahunan Pusat Riset Kelautan Tahun 2023.....	22
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Pusat Riset Kelautan Tahun 2023	29
Tabel 5. Sistem Pembobotan Atas Tingkat Validasi IKU.....	32
Tabel 6. Nilai Indeks Status Capaian NPSS	32
Tabel 7. Standar Status Kinerja NPSS.....	32
Tabel 8. Target dan Capaian Kinerja Pusat Riset Kelautan Triwulan I Tahun 2023	35
Tabel 9. Capaian IKU Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%).....	37
Tabel 10. Capaian IKU Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Riset Kelautan (%) ..	39
Tabel 11. Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Pusat Riset Kelautan yang Dokumen Tindaklanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	40
Tabel 12. Rincian Realisasi Anggaran Pusriskel Tahun 2023	42
Tabel 13. Rincian Realisasi Per Sasaran Kegiatan Tahun 2023.....	42
Tabel 14. Capaian Kinerja Pusriskel Triwulan I Tahun 2023	46
Tabel 15. Permasalahan dan Rekomendasi	47

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Riset Kelautan (Pusriskel) ini bertujuan untuk memberikan informasi kinerja Pusriskel yang terukur atas capaian kerjanya pada Triwulan I Tahun 2023 dan menjadi bahan perbaikan bagi Pusriskel dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kerjanya pada periode berikutnya.

Pengukuran capaian kinerja Pusat Riset Kelautan Triwulan I Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *Balanced ScoreCard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu aplikasi Kinerjaku pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja pada aplikasi tersebut diperoleh nilai capaian kinerja Pusriskel pada Triwulan I Tahun 2023 adalah sebesar 103,26% dengan 3 IKU yang telah memiliki capaian kinerja sebagai berikut:



INDIKATOR KINERJA		Target		Realisasi	
		2023	TW I	TW I	%
1.	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP lingkup Pusat Riset Kelautan (NSPK)	7	-	-	-
2.	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP Lingkup Pusat Riset Kelautan (unit)	3	-	-	-
3.	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Riset Kelautan (Rupiah Juta)	8,5	-	-	-

INDIKATOR KINERJA		Target		Realisasi	
		2023	TW I	TW I	%
4.	Kerjasama/Kemitraan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang disepakati (naskah Kerjasama)	3	-	-	-
5.	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%)	100	100	100	100,00
6.	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Kelautan dibandingkan Realisasi Anggaran Pusat Riset Kelautan TA 2022 (%)	≤ 0,5	-	-	-
7.	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Kelautan (Indeks)	78	-	-	-
8.	Nilai PM SAKIP Pusat Riset Kelautan (nilai)	75	-	-	-
9.	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Kelautan (nilai)	192	-	-	-
10.	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Riset Kelautan (%)	92	92	100	108,70
11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Pusat Riset Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75	75	75	100,00
12.	Unit Kerja Pusat Riset Kelautan yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit kerja)	1	-	-	-
13.	Nilai IKPA satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	89	-	-	-
14.	Nilai Kinerja Anggaran Satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	82	-	-	-

Capaian kinerja Pusat Riset Kelautan selama Triwulan I Tahun 2023 sudah baik (diatas 100%) dan dicerminkan dengan indikator berwarna hijau. Namun dalam proses pencapaian kinerjanya terdapat beberapa permasalahan yang ikut mempengaruhi capaian kinerja dan telah dilakukan langkah-langkah sebagai solusi pemecahan masalahnya, diantaranya adalah:

No.	Permasalahan	Rekomendasi
1.	Adanya peralihan ke mekanisme sistem kerja baru terkait Kelompok Kerja mengakibatkan belum optimalnya penyampaian data dukung kinerja oleh penanggungjawab IKU terhadap target waktu yang ditetapkan	Melakukan sosialisasi mekanisme sistem kerja baru kepada para Penanggungjawab IKU dan anggota pelaksana kegiatan mengenai uraian tugas dan tanggung jawabnya serta meminta para Penanggung jawab IKU agar dapat menyampaikan bahan dan data dukung capaian kinerja tepat waktu
2.	Belum semua IKU memiliki kegiatan pendukung dan alokasi anggaran dalam dokumen RKAKL	Melakukan revisi RKAKL dengan memasukkan kegiatan pendukung tercapainya IKU dan alokasi anggarannya

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

**B. TUGAS, FUNGSI DAN
STRUKTUR ORGANISASI**

C. KERAGAAN SDM

**D. SISTEMATIKA
LAPORAN KINERJA**

A. LATAR BELAKANG

Dalam melaksanakan program dan kegiatan penelitian dan pengembangan IPTEK, Pusat Riset Kelautan (Pusriskel) sebagai salah satu unit kerja Eselon II di lingkungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, semakin dituntut untuk menyesuaikan dengan perubahan sistem manajemen Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berazaskan akuntabilitas, dimana setiap penyelenggara negara dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerja atau hasil-hasilnya dari seluruh program/kegiatan kepada masyarakat atas penggunaan dana dan kewenangan yang diberikan.

Penerapan akuntabilitas mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan peraturan tersebut, Pusat Riset Kelautan (Pusriskel) wajib melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Sebagai implementasi dari pelaksanaan prinsip akuntabilitas hasil penyelenggaraan kegiatan dan anggaran dimaksud maka Pusriskel menyusun Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja ini disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu pada Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai acuan dalam perencanaan kinerja diantaranya adalah Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2021- 2024 dan Rencana Strategis BRSDM Tahun 2021-2024.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi. Kelima arahan utama arahan Presiden tersebut

dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024.



Gambar 1. Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024

Tujuh Agenda Pembangunan:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan,
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan,
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing,
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar,
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim,
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah/ pemasar hasil perikanan kelautan, dan petambak garam, dan para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya. Untuk itu, pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024 akan menjabarkan agenda pembangunan nasional dan arahan-arahan Presiden tersebut ke dalam program-

program pembangunan antara lain untuk kesejahteraan masyarakat, penyerapan lapangan pekerjaan, dan peningkatan devisa negara.

Renstra KKP menjelaskan bahwa Visi KKP didasarkan pada visi Indonesia 2045, yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Visi Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden.

Visi dan Misi

Visi KKP 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Visi BRSDM pada Tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

Visi Pusriskel mengacu pada visi BRSDM dan KKP:

Visi *“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong”*

Misi Pusriskel adalah menjalankan misi Presiden, KKP dan BRSDM dalam bidang kelautan dan perikanan. Dari 9 (sembilan) misi Presiden, Pusriskel mendukung 4 (empat) misi yang merupakan modifikasi dari misi yang diemban oleh KKP dan BRSDM. Modifikasi dilakukan dengan penyesuaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusriskel, yaitu:

1. Misi Ke-1: Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan.
2. Misi ke-2: Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan terhadap Perekonomian Nasional melalui Hasil Riset Kelautan.
3. Misi ke-4: Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan.

4. Misi ke-8: Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Pusat Riset Kelautan.

Implementasi dari visi dan misi Presiden dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Pusat Riset Kelautan Triwulan I Tahun 2023 ini adalah:

1. Mengukur capaian kinerja IKU yang ingin dicapai melalui program kerja dan kegiatan terkait pada Triwulan I Tahun 2023;
2. Mengevaluasi dan menganalisis capaian kinerja IKU pada Triwulan I Tahun 2023;
3. Menyusun akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan pada Triwulan I Tahun 2023.

Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Riset Kelautan ini, bertujuan:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian kinerja Pusriskel pada Triwulan I Tahun 2023;
2. Menjadi bahan perbaikan bagi Pusriskel dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya pada periode berikutnya.

B. TUGAS, FUNGSI, & STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 159 dan 160 menyatakan bahwa Pusat Riset Kelautan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, Pusat Riset Kelautan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kewilayahan, mitigasi, adaptasi, dan konservasi kelautan, serta sumber daya laut;
- b. penyiapan pelaksanaan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kewilayahan, mitigasi, adaptasi, dan konservasi kelautan, serta sumber daya laut;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan riset kelautan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan pusat.

Untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi dan dalam menjalankan ketenaganukliran serta keantariksaan, Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). BRIN mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi, serta melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Bab VII tentang Pengintegrasian, Pasal 65 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan bahwa:

- (1) Tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan kementerian/lembaga dialihkan menjadi tugas, fungsi dan kewenangan BRIN.
- (2) Pengalihan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan pengalihan pegawai negeri sipil, perlengkapan, pembiayaan dan aset yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, dan menjadi pegawai negeri sipil, perlengkapan, pembiayaan dan aset BRIN.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan salah satu Kementerian/ Lembaga (K/L) yang menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewenangan penelitian, pengembangan dan penerapan beserta Sumber Daya Manusia, Aset dan Anggaran pendukungnya sebelum terbitnya Perpres Nomor 78 Tahun 2021.

Sebagai implementasi amanah Perpres Nomor 78 Tahun 2021 maka pada tahun 2022 KKP telah melakukan serangkaian langkah sebagai tindaklanjutnya. Beberapa langkah yang telah dilaksanakan oleh KKP diantaranya adalah:

1. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) sebagai sebuah unit kerja eselon I di lingkungan KKP sudah tidak menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewenangan terkait penelitian, pengembangan dan penerapan;
2. KKP melaksanakan serah terima alih status penggunaan Barang Milik Negara (BMN) dari BRSDMKP kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), pada Kamis, 27 Oktober 2022, di Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT), Denpasar, Bali;
3. Pengalihan SDM Riset KKP ke BRIN berjumlah 529 orang terdiri atas 367 orang peneliti, 81 orang perekayasa dan 81 orang teknisi litkayasa dan telah dilantik menjadi jabatan fungsional periset di BRIN. Khusus dari BRSDM, SDM yang pindah ke BRIN berjumlah 443 orang.
4. Pemindahan anggaran riset dan belanja pegawai ke BRIN.

Pusat Riset Kelautan (Pusriskel) sebagai salah satu unit kerja eselon II di lingkungan BRSDMKP, KKP pada tahun anggaran 2022 sudah tidak menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewenangan terkait penelitian, pengembangan dan penerapan. Pada bulan November 2022 Pusriskel telah memproses revisi DIPA ke-7 terkait pemindahan anggaran riset dan belanja pegawai ke BRIN. Oleh karenanya sejak tahun 2022, Pusriskel sudah tidak memiliki IKU terkait kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan.

Secara kelembagaan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, lingkup Pusriskel terdapat 3 (tiga) satuan kerja, yaitu 1) Pusat Riset Kelautan-Jakarta; dan 2) UPT (Unit Pelaksana Teknis) di Pusriskel, yakni 1) Loka Riset Sumberdaya Kerentanan Pesisir (LRSDKP)-Bungus, Sumatera Barat (PermenKP No. 28 Tahun 2020); dan 2) Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LPTK)-Wakatobi, Sulawesi Tenggara (PermenKP No. 85 Tahun 2020); serta Instalasi Pengelolaan Sumberdaya Air Laut (IPSAL)-Madura, Jawa Timur; Unit Rintisan Teknologi Kelautan (PIAMARI)-Pangandaran, Jawa Barat dan calon UPT MIAMARI-Morotai, Maluku Utara.

Untuk membantu penyelenggaraan tugas dan fungsi Pusat Riset Kelautan tersebut, maka Kepala Pusat Riset Kelautan telah mengeluarkan Surat Perintah Nomor B.4.1/BRSDM.2/KP.440/I/2023 tanggal 02 Januari 2023 untuk memberikan perintah melaksanakan tugas sebagai Ketua Kelompok Indikator

Kinerja Kegiatan, Penanggung Jawab IKK, dan Anggota, pada Pusat Riset Kelautan di samping jabatan fungsionalnya, yakni:

A. Kelompok Kerja Kegiatan Pelayanan Internal, mempunyai tugas:

1. Penyusunan Naskah NSPK, Penyusunan Karya Tulis Kedinasan terkait Kebijakan, Penyusunan Karya Tulis Ilmiah terkait Kebijakan.
2. Penatausahaan Pengadaan Barang/Jasa, Penyusunan Rencana PBJ (Dokumen KAK?RAB/HPS, Kontrak, BAST).
3. Pengelolaan Unit Rintisan (PIAMARI, MIAMARI, Lab. Pasar Minggu, Lombok, Saumlaki, Natuna), Pengelolaan Sarana Perkantoran (Ancol), Penyusunan RK BMN dan Laporan Pengadaan, Pengelolaan Persuratan dan Kearsipan, Penatausahaan Perjalanan Dinas dan Pertemuan Pimpinan serta Urusan Rumah tangga, Pengelolaan *Whistle Blower*, Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict Of Interest/ COI*), Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Penatalaksanaan SOP, Surat Keputusan, Surat Perintah, dan Naskah Akademik.
4. Pengelolaan Urusan SDM dan Pengelolaan IP ASN.

B. Kelompok Kerja Kegiatan Pelayanan Teknis, mempunyai tugas:

1. Penyusunan Proposal PNBPN, Pembinaan Penatalaksanaan PNBPN UPT, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PNBPN.
2. Inisiasi, telaah dokumen, dan evaluasi pelaksanaan kerjasama/ Kemitraan, Koordinasi pelaksanaan, penyusunan rencana kegiatan dan monitoring capaian output Kegiatan SFV.
3. Pengelolaan: Bitrix, Data dan Informasi, Jurnal, Sistem Informasi, Command Center, dan IGT Pengelolaan.
4. Pengelolaan Layanan Publik, Persiapan menuju WBK, Pendampingan Penerapan Pelayanan Publik, Pengelolaan Media Sosial, Podcast dan Website, Dokumentasi dan Peliputan Kegiatan, dan Pengelolaan PPID.

C. Kelompok Kerja Kegiatan Keuangan, mempunyai tugas:

1. Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN, Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN, dan Penyusunan Laporan SPIP berbasis MR.
2. Pengelolaan Revisi Anggaran, Penatausahaan Keuangan, Penatausahaan Kontraktual, Pembayaran Tagihan Kontraktual dan Non-Kontraktual, dan Pembayaran Belanja Pegawai.
3. Penyusunan Laporan Capaian Output, Penyusunan Laporan Serapan Anggaran, dan Input Aplikasi SMART-DJA.

D. Kelompok Kerja Kegiatan Perencanaan, mempunyai tugas:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Program, Anggaran, dan Kinerja serta Revisi Dokumen Perencanaan, Penilaian Mandiri SAKIP, Pemenuhan Dokumen SAKIP lainnya, dan Penyusunan Laporan Evaluasi SAKIP.
2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi, Penyusunan Laporan Kinerja, Pelaksanaan Rekonsiliasi Capaian Kinerja, Penilaian Mandiri Rekonsiliasi Kinerja, dan Pemenuhan Dokumen Rekonsiliasi kinerja lainnya.
3. Pemenuhan Dokumen Tindak Lanjut, Pendampingan Pelaksanaan pengawasan APIP, dan Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

C. KERAGAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Pada awal tahun 2023, perubahan keragaan pegawai yang terjadi adalah perubahan jabatan dari jabatan pelaksana ke jabatan fungsional, yang mengakibatkan berubahnya komposisi jabatan dan juga beralihnya pegawai ke luar satuan kerja Pusat Riset Kelautan. Sumber Daya Manusia (SDM) Lingkup Pusat Riset Kelautan pada Triwulan I Tahun 2023 total berjumlah 128 orang, yang terdiri dari 69 orang pegawai PNS dan 59 orang tenaga kontrak, dengan distribusi yang dapat dilihat dalam tabel berikut.

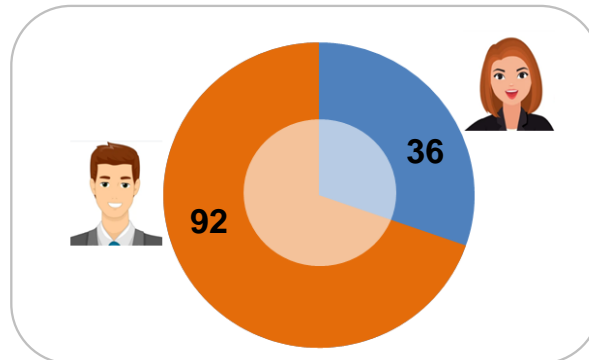
Sehubungan dengan perubahan data tersebut, distribusi pegawai pada Pusat Riset Kelautan dan UPT dibawahnya berdasarkan jenis kelamin, sebaran Pendidikan disampaikan dalam tabel dan gambar grafik dibawah ini:

Tabel 1. Distribusi Pegawai Lingkup Pusat Riset Kelautan

Jenis Kelamin Berdasarkan Satker dan Jenis Kepegawaian	PNS		KONTRAK		Jumlah
	L	P	L	P	
PRK	33	14	16	10	73
LRSDKP	10	4	16	3	33
LPTK	7	1	10	4	22
JUMLAH	50	19	42	17	128

Dari total 128 orang pegawai tersebut, terdapat satu orang pegawai yang berstatus dipekerjakan di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa sebaran gender pada pegawai lingkup Pusat

Riset Kelautan lebih didominasi oleh laki-laki sebanyak 92 orang pegawai, sedangkan perempuan sebanyak 36 orang pegawai.



Gambar 2. Sebaran Pegawai berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan

Dari data pegawai berdasarkan Pendidikan tersebut masih terdapat satu Pegawai yang sedang menjalankan tugas belajar, dan sembilan pegawai yang sedang menjalankan izin belajar. Tugas dan izin belajar tersebut nantinya akan meningkatkan kompetensi pegawai melalui Pendidikan.

D. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA (LKJ)

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sistematika penyajian laporan adalah sebagai berikut:

- **Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, dan capaian kinerja serta kendala selama Triwulan I Tahun 2023;

- **Bab I – Pendahuluan**, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang unit kerja Pusat Riset Kelautan seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di Pusat Riset Kelautan;
- **Bab II – Perencanaan Kinerja**, menyajikan rencana strategis Pusat Riset Kelautan pada TA 2020-2024, Rencana Kerja Tahunan dan penetapan kinerja tahunan Tahun 2022 serta pengukuran kinerja;
- **Bab III – Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan analisis terhadap capaian kinerja dan keuangan pada Triwulan I Tahun 2023:
 - a) Capaian Kinerja Organisasi
 - Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2022;
 - Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Triwulan I Tahun 2023 dengan Triwulan I Tahun 2022;
 - Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan standar nasional; (jika ada);
 - Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan;
 - Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya;
 - Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.
 - b) Realisasi Anggaran Pusat Riset Kelautan dan seluruh UPT.
- **Bab IV - Penutup**, menyajikan uraian singkat kesimpulan terhadap pencapaian kinerja di Triwulan I Tahun 2023 serta Permasalahan dan Rekomendasi.
- **Lampiran:**
 - a) Perjanjian Kinerja Pusriskel TA 2023;
 - b) Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. RENSTRA PUSRIS KEL 2020 -2024**
- B. RENCANA KERJA TAHUNAN 2023**
- C. PERJANJIAN KINERJA TA 2023**
- D. POTENSI & PERMASALAHAN**
- E. PENGUKURAN KINERJA**

A. RENCANA STRATEGIS PUSRISKEL 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 159 dan 160 menyatakan bahwa Pusat Riset Kelautan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Pusriskel berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada Rencana Strategis BRSDMKP Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis Badan Riset dan Sumber Daya Manusia dan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut Renstra BRSDM, adalah dokumen perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Rencana Strategis Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan (Renstra BRSDM) Tahun 2020 – 2024 sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan Riset dan Sumber Daya Manusia merupakan reviu Renstra Balitbang KP dan BPSDMP KP Tahun 2015 – 2019, sebagai turunan dari Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI (Permen KP) Nomor 25/PERMEN-KP/2015.

1. Tujuan

Sesuai dengan visi dan misi diatas, Pusat Riset Kelautan telah menetapkan rencana kinerja dan target kinerja yang akan dicapai pada tahun anggaran 2022. Sasaran dan tujuannya adalah:

- 1) Menyelenggarakan riset kelautan secara terpadu dengan tata kelola yang baik (*good governance*);
- 2) Mempercepat pemanfaatan hasil riset lingkup internal Pusriskel dan *stakeholder* strategis lainnya;
- 3) Meningkatkan kompetensi Riset SDM kelautan yang mampu meningkatkan, nilai tambah dan daya saing kelautan secara optimal.

2. Sasaran

Rencana strategis (Renstra) menyajikan sasaran kegiatan yang hendak dicapai, yang dapat diukur berdasarkan indikator kinerja yang ada. Berdasarkan Sasaran Kegiatan BRSDM KP, Pusat Riset Kelautan kemudian menindaklanjutinya

dengan menyusun Peta Strategi Level II Pusat Riset Kelautan TA 2023 dalam kerangka *Balance Score Card* (BSC), yang telah disepakati antara Plt. Kepala Pusat Riset Kelautan dengan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Peta strategi Pusat Riset Kelautan memetakan setiap Sasaran Kegiatan (SK) yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai visi dan misi yang diemban. Dengan menggunakan metodologi *Balance Score Card*, Sasaran Kegiatan (SK) Pusat Riset Kelautan dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2. Sasaran Kegiatan Pusriskel

SK 1	Tersedianya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP
SK 2	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan
SK 3	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Pusat Riset Kelautan

Selanjutnya target kinerja T.A 2023 tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan yang merupakan dokumen perencanaan yang mempresentasikan rencana dan janji untuk mentargetkan kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimilikinya.

Tabel 3. Rencana Kinerja Tahunan Pusat Riset Kelautan Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2023
1.	Tersedianya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP	1.	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP lingkup Pusat Riset Kelautan (NSPK)	7
2.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan	2.	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP Lingkup Pusat Riset Kelautan (unit)	3
3.	Tatakelola Pemerintahan yang Baik pada Pusat Riset Kelautan	3.	Nilai PNBPN Satker Lingkup Pusat Riset Kelautan (Rupiah Juta)	8,5
		4.	Kerjasama/Kemitraan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang disepakati (naskah Kerjasama)	3
		5.	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%)	100
		6.	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Kelautan dibandingkan	≤ 0,5

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023
		Realisasi Anggaran Pusat Riset Kelautan TA 2022 (%)	
		7. Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Kelautan (Indeks)	78
		8. Nilai PM SAKIP Pusat Riset Kelautan (nilai)	75
		9. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Kelautan (nilai)	192
		10. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Riset Kelautan (%)	92
		11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Pusat Riset Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75
		12. Unit Kerja Pusat Riset Kelautan yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit kerja)	1
		13. Nilai IKPA satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	89
		14. Nilai Kinerja Anggaran Satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	82

Awal Tahun 2023, Pusat Riset Kelautan telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja antara Plt. Kepala Pusat Riset Kelautan dengan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM). Pada kontrak kinerja tersebut terdapat peta strategi (*strategy map*) dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai. Renstra Pusat Riset Kelautan Tahun 2020-2024 menjelaskan bahwa Sasaran Kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan melalui pelaksanaan program riset kelautan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Pusat Riset Kelautan sebagai suatu *outcome/impact* dari program yang dilaksanakan, dengan menggunakan pendekatan metode *Balanced Score Card* (BSC).

Peta strategi Pusat Riset Kelautan memetakan setiap Sasaran Kegiatan (SK) yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai visi dan misi yang diemban. Dengan menggunakan metodologi *Balance Score Card*, Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Pusat Riset Kelautan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Sasaran Kegiatan (SK) 1** dengan sasaran yang akan dicapai adalah **Tersedianya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP**, terdiri atas 1 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:
 - IKU 1: Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP lingkup Pusat Riset Kelautan (NSPK) dengan target 7. Merupakan nama IKU baru dari IKU Hasil perumusan kebijakan KP yang

digunakan untuk penyusunan kebijakan (Rekomendasi Kebijakan) dengan target 8 pada tahun 2022, namun dihapuskan karena alih fungsi Riset, dan target 7 pada tahun 2021.

2. **Sasaran Kegiatan (SK) 2**, dengan sasaran yang akan dicapai adalah **Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan**, terdiri atas 1 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

- IKU 2: Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP Lingkup Pusat Riset Kelautan (unit) dengan target 3, dan target 2 pada tahun 2022 (IKU Baru ditahun 2022).

3. **Sasaran Kegiatan (SK) 3**, dengan sasaran yang akan dicapai adalah **Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pusat Riset Kelautan**, terdiri atas 12 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

- IKU 3: Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Riset Kelautan (Rupiah Juta) dengan target 8,5 dan merupakan IKU baru di tahun 2023.
- IKU 4: Kerjasama/Kemitraan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang disepakati (naskah Kerjasama) dengan target 3, tidak ada IKU ini di tahun 2022, target 26 dengan nama IKU Jejaring dan/atau kerjasama riset Kelautan yang disepakati dan ditindaklanjuti pada tahun 2021, dan target 26 di tahun 2022.
- IKU 5: Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%), dengan target 100 setiap tahun selama 2021-2024.
- IKU 6: Batas Tertinggi Persentase Nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Kelautan (persen) dibandingkan Realisasi anggaran Pusat Riset Kelautan TA 2022 (%), dengan target tahun $\leq 0,5$, target ≤ 1 pada tahun 2022,2021 dan 2020.
- IKU 7: Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Kelautan (Indeks), dengan target 78, target 76 pada tahun 2022 dan target 73 pada tahun 2021 dan target 72 di tahun 2022.
- IKU 8: Nilai PM SAKIP Pusat Riset Kelautan dengan target 75 (merupakan IKU baru ditahun 2023).
- IKU 9: Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Kelautan (Nilai), dengan target tetap 92, target 92 pada tahun 2022, dan target 87 pada tahun 2021.
- IKU 10: Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Riset Kelautan (%), dengan target 92, target 86 pada tahun 2022, target 84 pada tahun 2021, dan target 82 di tahun 2020.

- IKU 11: Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang Dokumen Tindaklanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (persen), dengan target 75, target 70 pada tahun 2022, target 65 pada tahun 2021, dan target 60 di tahun 2020.
- IKU 12: Unit kerja Lingkup Pusat Riset Kelautan yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit) dengan target 1, merupakan IKU baru dengan target 1 pada tahun 2022.
- IKU 13: Nilai IKPA satker Pusat Riset Perikanan (nilai) dengan target 89, merupakan IKU baru ditahun 2023.
- IKU 14: Nilai Kinerja Anggaran Satker Pusat Riset Perikanan (nilai) dengan target 82, merupakan IKU baru ditahun 2023.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

a. Potensi

Pusriskel merupakan salah satu unit eselon II di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusat Riset Kelautan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Riset Kelautan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kewilayahan, mitigasi, adaptasi, dan konservasi kelautan, serta sumber daya laut;
- b. penyiapan pelaksanaan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kewilayahan, mitigasi, adaptasi, dan konservasi kelautan, serta sumber daya laut;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan riset kelautan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan pusat.



Gambar 3. Satker UPT Pusriskel

Cakupan organisasi Pusriskel meliputi: 1) Pusat Riset Kelautan; 2) Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir; 3) Loka Perekayasa Teknologi Kelautan; dan 4) Kelompok Jabatan Fungsional. Disamping itu juga terdapat 2 Instalasi (Instalasi Pengolahan Sumberdaya Air Laut Pamekasan dan Instalasi Laboratorium SATREPS Pasar Minggu) dan 1 Unit Ritisasi (PIAMARI Pangandaran), serta masih ada 1 calon UPT yaitu MIAMARI Morotai.

Pada awal tahun 2023, perubahan keragaan pegawai yang terjadi adalah perubahan jabatan dari jabatan pelaksana ke jabatan fungsional, yang mengakibatkan berubahnya komposisi jabatan dan juga beralihnya pegawai ke luar satuan kerja Pusat Riset Kelautan. Sumber Daya Manusia (SDM) Lingkup Pusat Riset Kelautan pada Triwulan I Tahun 2023 total berjumlah 128 orang, yang terdiri dari 69 orang pegawai PNS dan 59 orang tenaga kontrak.

Disamping itu, Pusat Riset Kelautan juga didukung oleh adanya bengkel/workshop mekanikal, material, modeling, mekatronika serta *Authomatic Identification System* (AIS), Aquarium sebagai bank coral dan ikan air, dan laboratorium pengembangan produk garam yang cukup lengkap.

b. Permasalahan

Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan antara lain:

- 1) Pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional mengakibatkan beberapa hal antara lain:
 - a. Seluruh sumberdaya riset, baik sumber daya manusi, anggaran dan program riset berpindah ke BRIN;
 - b. Pusat Riset Kelautan tidak memiliki Tugas Pokok dan Fungsi Riset lagi;
 - c. Pusat Riset beum bisa mengusulkan program dan kegiatan baru menunggu terbentuknya organisasi baru;
 - d. Program dan anggaran yang dapat dilaksanakan adalah kegiatan rutin perkantoran berupa dukungan manajemen;
- 2) Belum optimalnya kolaborasi pemanfaatan hasil riset dan pengembangan SDM untuk memperkuat capaian output dan sasaran kinerja kementerian serta merespon isu SDM dan riset nasional, regional, dan Internasional;
- 3) Kurang optimalnya kerjasama dalam dan luar negeri jejaring kerjasama (instansi pemerintah, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat/ LSM dalam dan luar negeri, serta dunia usaha dan industri (DUDI)) untuk meningkatkan kapasitas riset dan SDM KP yang dapat membuka peluang terhadap pemanfaatan bersama aset/sumber daya (*resource sharing*);
- 4) Pemanfaatan aset dan sarana prasarana eks-riset belum optimal;
- 5) Belum tersedianya regulasi pendukung serta terbatasnya kemampuan melakukan hilirisasi dan komersialisasi hasil riset terdahulu untuk kebutuhan industri.

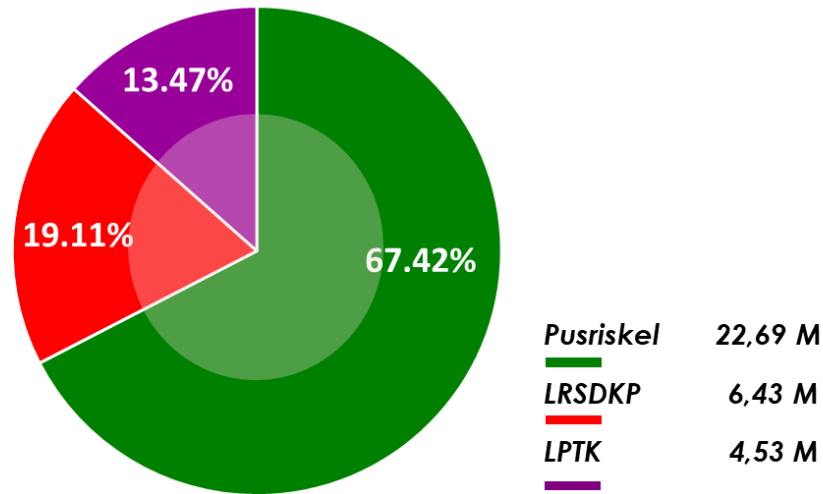
C. RENCANA KERJA TAHUNAN 2023

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran kegiatan, maka Rencana Kerja Pusat Riset Kelautan Tahun 2023 menetapkan 1 program yaitu Program Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dengan pagu anggaran Rp. 33.650.000.000,- dengan rincian kegiatan:

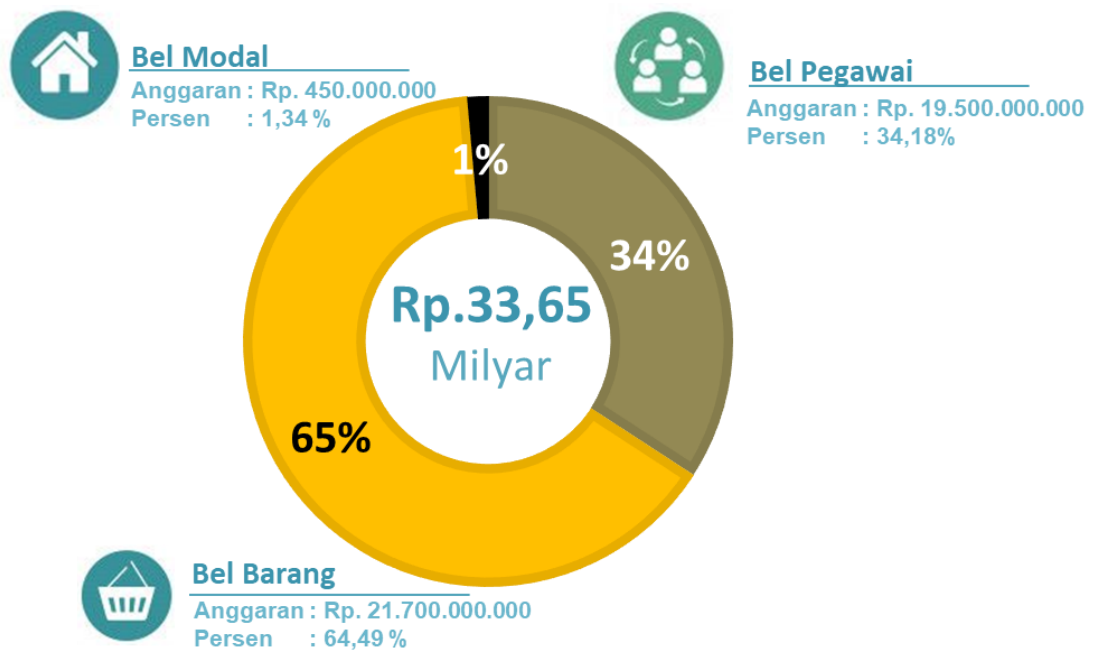
- 1) Hasil Perumusan Kebijakan, pagu sebesar Rp. 2.800.000.000,-
- 2) Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, pagu sebesar Rp. 30.850.000.000,-

Rincian anggaran Pusat Riset Kelautan dan masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah sebagai berikut

1. Pusat Riset Kelautan sebesar Rp. 22.687.649.000,-
2. Loka Sumber Daya Kerentanan Pesisir sebesar Rp. 6.429.852.000,-
3. Loka Perencanaan teknologi Kelautan sebesar Rp. 4.532.499.000,-



Gambar 4. Pagu Anggaran Lingkup Pusriskel Tahun 2023



Gambar 5. Postur Anggaran Pusriskel Tahun 2023.

Berdasarkan postur anggaran Lingkup Pusriskel terlihat bahwa jenis belanja paling besar dialokasikan untuk Belanja Barang sebesar Rp. 21.700.000.000,- atau 64,49%; Belanja Pegawai dari sebesar Rp. 11.500.000.000,- atau 34,18% dan Belanja Modal sebesar Rp. 450.000.000,- atau 1,34%.

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala Pusat Riset Kelautan kepada Koordinator dan jabatan fungsional lingkup Pusat Riset Kelautan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan sasaran kegiatan dan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai tolak ukur dan dasar evaluasi kinerja, serta sebagai dasar penilaian kegagalan/keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Perjanjian Kinerja Pusat Riset Kelautan Tahun 2023 telah ditandatangani oleh Plt. Kepala Pusat Riset Kelautan dan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) pada Januari 2023, sebagai berikut:

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Pusat Riset Kelautan Tahun 2023


SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2023
1.	Tersedianya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP	1.	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP lingkup Pusat Riset Kelautan (NSPK)	7
2.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan	2.	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP Lingkup Pusat Riset Kelautan (unit)	3
3.	Tatakelola Pemerintahan yang Baik pada Pusat Riset Kelautan	3.	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Riset Kelautan (Rupiah Juta)	8,5
		4.	Kerjasama/Kemitraan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang disepakati (naskah Kerjasama)	3
		5.	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%)	100
		7.	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Kelautan (Indeks)	78
		6.	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Kelautan dibandingkan Realisasi Anggaran Pusat Riset Kelautan TA 2022 (%)	≤ 0,5
		8.	Nilai PM SAKIP Pusat Riset Kelautan (nilai)	75
		9.	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Kelautan (nilai)	192
		10.	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Riset Kelautan (%)	92

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2023
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Pusat Riset Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75
		12.	Unit Kerja Pusat Riset Kelautan yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit kerja)	1
		13.	Nilai IKPA satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	89
		14.	Nilai Kinerja Anggaran Satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	82

E. PENGUKURAN KINERJA

a. Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja Pusriskel Tahun 2023, dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasinya, dengan rumus pengukuran sebagai berikut:.



$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dengan membandingkan antara realisasi dan rencana, maka dapat dilihat jumlah persentase capaian pada masing-masing indikator kinerja, dan akan diperoleh indeks capaian IKU.

Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;

Adapun status Indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:



Gambar 6. Indeks Capaian IKU

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing-masing Indikator yang ada dalam dokumen *Balanced Scores Card* (BSC).

b. Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja lingkup BRSDM dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengukuran, telah ditugaskan kepada Tim SAKIP dan Penyusun Laporan Kinerja lingkup Pusat Riset Kelautan yang ditetapkan melalui ditetapkan Surat Perintah Plt. Kepala Pusat Riset Kelautan Nomor: B.266/BRSDM.2/TU.110/III/2023 tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Pusat Riset Kelautan 2023.

Keanggotaan Tim SAKIP dan Penyusun Laporan Kinerja terdiri dari Kepala Staker UPT, Ketua Kelompok Kerja, Penanggung Jawab IKK dan staf Pusat Riset Kelautan. Dalam pelaksanaannya, capaian kinerja triwulanan dipantau oleh Tim SAKIP dan Penyusun Laporan Kinerja yang menjadi penanggung jawab kegiatan, selanjutnya penanggung jawab kegiatan melaporkannya kepada Kepala Pusat Riset Kelautan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan strategis pada peta strategi yang dituangkan pada penetapan kinerja Tahun 2023 dapat tercapai.

Pengukuran kinerja Pusat Riset Kelautan pada Triwulan I Tahun 2023 mengacu pada hasil pengukuran yang telah ditetapkan dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan alamat

website: <http://kinerjaku.kkp.go.id/2023>. Penilaian pencapaian sasaran diukur berdasarkan Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSS).

NPSS adalah nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh IKU di dalam satu Sasaran Kegiatan (SK). Status capaian SK yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau (buruk/sedang/baik) ditentukan oleh NPSS. Untuk menghitung NPSS perlu diperhatikan bobot masing-masing IKU terhadap SK tersebut dengan indeks toleransi 0%. Sistem pembobotan yang digunakan didasarkan atas tingkat validitas IKU sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. Sistem Pembobotan Atas Tingkat Validasi IKU

No.	Validitas IKU	Bobot
1.	Lead Input	0,1
2.	Lead Proses	0,2
3.	Lag output	0,3
4.	Lag Outcome	0,4

Tabel 6. Nilai Indeks Status Capaian NPSS

Baik	Sedang	Buruk
Indeks Capaian >100 %	Indeks Capaian =100%	Indeks Capaian < 100 %

Untuk melakukan pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menentukan dan menyepakati standar status kinerja NPSS sesuai dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 7. Standar Status Kinerja NPSS

KLASIFIKASI			STATUS NPSS (Toleransi 0%)
MAXIMIZE	MINIMIZE	STABILIZE	
X<100%	X>100%	X>100% atau X<100%	Buruk
X=100%	X=100%	-	Sedang
X≥100%	X≤100%	X=100%	Baik

Dalam melakukan pengukuran kinerja harus menentukan klasifikasi target indikator kinerja diantaranya adalah: *Maximize* adalah semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; *Minimize* adalah semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; *Stabilize* adalah semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

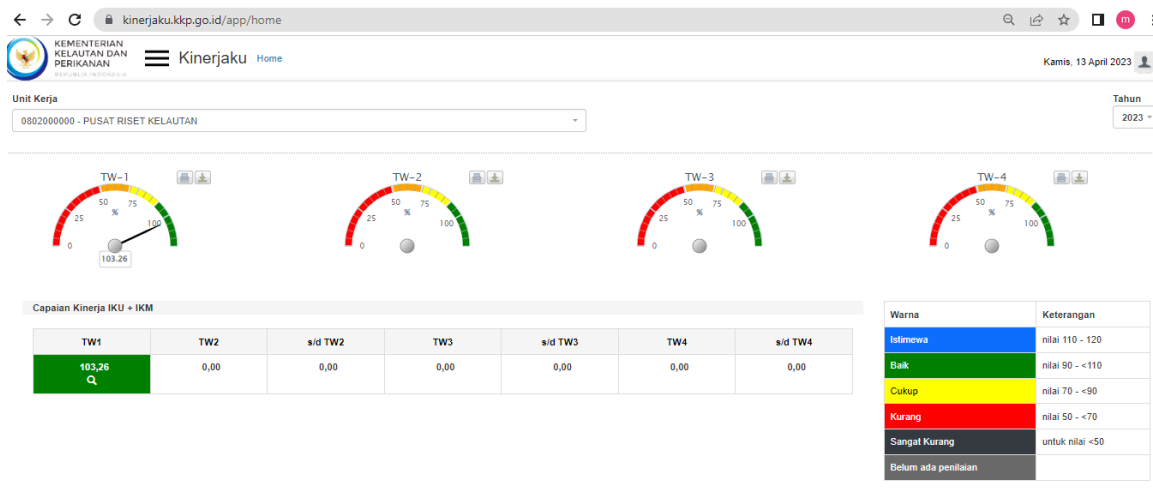
**A. PRESTASI INDIKATOR
KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2023**

**B. EVALUASI DAN ANALISIS
KINERJA**

**C. EFISIENSI SUMBER DAYA
DAN ALOKASI ANGGARAN**

A. PRESTASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Riset Kelautan Triwulan I Tahun 2023 mengalami perubahan dan penyesuaian yang mengacu pada *Balanced Score Card* (BSC). Berdasarkan penetapan target pada setiap indikator kinerja tersebut, ada indikator kinerja yang telah berhasil dicapai. Pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan I Tahun 2023 yang mengacu *Balanced Score Card* (BSC) dengan bantuan perangkat lunak berbasis *Balanced Score Card* dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh nilai capaian kinerja Pusat Riset Kelautan di tingkat korporat Triwulan I Tahun 2023 sebesar 103,26% sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 7. Nilai Capaian Kinerja Pusriskel tahun 2023

Dari hasil pengukuran kinerja Triwulan I Tahun 2023 dapat diketahui bahwa dari 14 IKU Pusat Riset Kelautan telah terdapat 3 capaian kinerja IKU sesuai dengan target yang ditetapkan, dengan nilai kinerja baik yang ditunjukkan dengan indikator berwarna hijau.

B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSS) pada Triwulan I Tahun 2023, dari 3 Sasaran Kegiatan (SK) dan 14 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Riset Kelautan menunjukkan memiliki kinerja baik (diatas target yang telah ditetapkan), ditandai dengan warna hijau sesuai dengan tabel berikut.

Tabel 8. Target dan Capaian Kinerja Pusat Riset Kelautan Triwulan I Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA		Target		Realisasi	
		2023	TW I	TW I	%
1.	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP lingkup Pusat Riset Kelautan (NSPK)	7	-	-	-
2.	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP Lingkup Pusat Riset Kelautan (unit)	3	-	-	-
3.	Nilai PNBPN Satker Lingkup Pusat Riset Kelautan (Rupiah Juta)	8,5	-	-	-
4.	Kerjasama/Kemitraan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang disepakati (naskah Kerjasama)	3	-	-	-
5.	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%)	100	100	100	100,00
6.	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Kelautan dibandingkan Realisasi Anggaran Pusat Riset Kelautan TA 2022 (%)	≤ 0,5	-	-	-
7.	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Kelautan (Indeks)	78	-	-	-
8.	Nilai PM SAKIP Pusat Riset Kelautan (nilai)	75	-	-	-
9.	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Kelautan (nilai)	192	-	-	-
10.	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Riset Kelautan (%)	92	92	100	108,70
11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Pusat Riset Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75	75	75	100,00
12.	Unit Kerja Pusat Riset Kelautan yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit kerja)	1	-	-	-
13.	Nilai IKPA satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	89	-	-	-
14.	Nilai Kinerja Anggaran Satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	82	-	-	-

Rincian pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Triwulan I Tahun 2023 yang mengacu *Balanced Score Card* (BSC) adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1

Tersedianya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP

IKU 1: Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP lingkup Pusat Riset Kelautan (NSPK)

Belum terdapat capaian kinerja pada IKU ini, capaian baru dapat diukur pada triwulan IV.

Sasaran Kegiatan 2

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan

IKU 2: Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP Lingkup Pusat Riset Kelautan (unit)

Belum terdapat capaian kinerja pada IKU ini, capaian baru dapat diukur pada triwulan IV.

Sasaran Kegiatan 3

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pusat Riset Kelautan

IKU 3: Nilai PNPB Satker Lingkup Pusat Riset Kelautan (Rupiah Juta)

Belum terdapat capaian kinerja pada IKU ini, capaian baru dapat diukur pada triwulan IV.

IKU 4: Kerjasama/Kemitraan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang disepakati (naskah Kerjasama)

Belum terdapat capaian kinerja pada IKU ini, capaian baru dapat diukur pada triwulan IV.

IKU 5: Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%)

Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan meliputi Kegiatan Layanan Tata Laksana, Kegiatan Layanan Kesekretariatan Pimpinan, Kegiatan Layanan Perkantoran, Kegiatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, serta Kegiatan Layanan Penyelenggaraan Kearsipan yang dilaksanakan pada tahun 2023.

Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal =

$$\frac{\text{Jumlah realisasi dokumen hasil layanan}}{\text{Jumlah target dokumen hasil layanan}} \times 100\%$$

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pusat Riset Kelautan Tahun 2023 ditetapkan target IKU ini adalah sebesar 100%. Capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Capaian IKU Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%)

SK- 3		Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Pusat Riset Kelautan							
IKU- 5		Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Riset Kelautan (%)							
Realisasi TW I 2020- 2022			2023					Renstra KKP 2020-2024 (PermenKP 57/2020)	
2020	2021	2022	Target	Target TW I	Realisasi TW I	% capaian	% Kenaikan TW I 2022-2023	Target 2024	% Capaian terhadap target 2024
100	100	100	100	100	100	100	-	100	100

Pada Triwulan I Tahun 2023 capaian IKU ini telah mencapai target yang ditetapkan yakni 100%, dengan persentase capaian sebesar 100%. Bila dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2022 tidak terdapat kenaikan atau penurunan capaian pada IKU ini.

Keberhasilan atas pencapaian IKU ini disebabkan oleh terlaksananya seluruh kegiatan manajerial di lingkup Pusat Riset Kelautan pada triwulan 1 dengan telah disampaikannya Laporan kegiatan manajemen internal Pusat Riset Kelautan, yakni:

1. Kegiatan Layanan Tata Laksana;
2. Kegiatan Layanan Kesekretariatan Pimpinan;
3. Kegiatan Layanan Perkantoran;
4. Kegiatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
5. Kegiatan Layanan Penyelenggaraan Kearsipan.

Kegiatan pendukung yang menunjang tercapainya IKU ini adalah terlaksananya pengelolaan barang milik negara, kesekretariatan dan operasional pimpinan, kegiatan rutin perkantoran meliputi kebutuhan sehari-hari, penyusunan dokumen pengadaan dan pengadministrasian persuratan.

IKU 6: Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Kelautan dibandingkan Realisasi Anggaran Pusat Riset Kelautan TA 2022 (%)

Belum terdapat capaian kinerja pada IKU ini, capaian baru dapat diukur pada triwulan IV.

IKU 7: Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pusat Riset Kelautan (Indeks)

Belum terdapat capaian kinerja pada IKU ini, capaian baru dapat diukur pada triwulan berikutnya.

IKU 8: Nilai PM SAKIP Pusat Riset Kelautan (Nilai)

Belum terdapat capaian kinerja pada IKU ini, capaian baru dapat diukur pada triwulan IV.

IKU 9: Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Kelautan (Nilai)

Belum terdapat capaian kinerja pada IKU ini, capaian baru dapat diukur pada triwulan IV.

IKU 10: Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Riset Kelautan (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Perhitungan indikator ini berasal dari penilaian 2 komponen, yaitu Komponen Dokumen, dan Komponen Keaktifan, dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui aplikasi *Bitrix24*.

Formula perhitungan IKU ini adalah:

$$MP_{\text{Pusat}} = \text{Nilai Pemenuhan Dokumen} + \text{Nilai Keaktifan}$$

Hasil capaian pada akhir tahun merupakan nilai rata-rata capaian pada triwulan I-IV

Konten dokumentasi kegiatan rapat/seminar/workshop/diseminasi dengan memenuhi unsur 5W1H mendapatkan **poin 0,5**;

Konten berupa karya tulis, jurnal atau penelitian sesuai dengan tugas/fungsi jabatan dengan **poin 1**;

Konten video/campaign diharapkan bersifat edukasi atau ajakan dengan **poin 3**.

- Cara Mengukur:
 - a) Menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan yang ditunjuk (*bitrix*)
 - b) Pengukuran dilakukan setiap triwulan, dengan rincian:
 - Keikutsertaan akan direkap setiap hari dalam satu triwulan
 - Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.

- Pengukuran level 1 dihitung dengan lingkup pejabat pusat
- Pusdatin menyediakan data hasil rekapan pejabat yang telah aktif pada setiap triwulan untuk diolah dan dijadikan nilai IKU MP masing-masing unit kerja eselon I.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pusat Riset Kelautan tahun 2023 ditetapkan target IKU ini adalah sebesar 92%. Capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Capaian IKU Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Riset Kelautan (%)

SK- 3		Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Pusat Riset Kelautan							
IKU- 10		Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Pusat Riset Kelautan (%)							
Realisasi TW I 2020- 2022			2023					Renstra KKP 2020-2024 (PermenKP 57/2020)	
2020	2021	2022	Target	Target TW I	Realisasi TW I	% capaian	% Kenaikan TW I 2022-2023	Target 2024	% Capaian terhadap target 2024
75,67	95,14	100	92	92	100	108,70	-	92	108,70

Pada Triwulan I Tahun 2023 capaian IKU ini telah melebihi target yang ditetapkan, yaitu 100% dengan persentase capaian 108,70%. Bila dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2022 tidak terdapat kenaikan atau penurunan capaian.

Keberhasilan atas pencapaian indikator ini disebabkan oleh pemanfaatan sistem informasi atau medis sosial berupa BitrixKKP dalam menyampaikan sharing dokumen perencanaan kinerja dan penyampaian/posting informasi, berita dan kegiatan baik riset maupun manajerial di lingkungan KKP.

Kegiatan pendukung yang menunjang tercapainya IKU ini adalah telah meng-upload dokumen perencanaan kinerja tahun 2023, diantaranya adalah Renstra 2020-2024, Manual IKU Level 2, Perjanjian Kinerja Level 2, Rencana Aksi atas PK Tahunan Level 2, Laporan Kinerja Level 2 Tahun 2022 pada media sosial tersebut serta keaktifan pegawai dalam membagikan kegiatan yang dilaksanakan pada SI-MP tersebut.

IKU 11: Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Pusat Riset Kelautan Yang Dokumen Tindaklanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

Jumlah rekomendasi **hasil pengawasan Itjen** yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti **secara tuntas** (status tindak lanjut adalah **TUNTAS**) oleh Pusat Riset Kelautan.

Formula perhitungan IKU ini adalah:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Pusat Riset Kelautan}} \times 100\%$$

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pusat Riset Kelautan tahun 2023 ditetapkan target IKU ini adalah sebesar 75%. Capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Pusat Riset Kelautan yang Dokumen Tindaklanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

SK- 3		Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Pusat Riset Kelautan							
IKU- 11		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Pusat Riset Kelautan Yang Dokumen Tindaklanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan (%)							
Realisasi TW I 2020- 2022			2023					Renstra KKP 2020-2024 (PermenKP 57/2020)	
2020	2021	2022	Target	Target TW I	Realisasi TW I	% capaian	% Kenaikan TW I 2022-2023	Target 2024	% Capaian terhadap target 2024
100	100	100	75	75	75	100	-25	100	100

Pada Triwulan I Tahun 2023 capaian IKU ini telah mencapai target yang ditetapkan, yakni 100% rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti dan disampaikan, dengan persentase capaian sebesar 100%. Bila dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2022 terdapat penurunan capaian sebesar 25 % dikarenakan adanya perubahan dalam penyampaian nilai capaian, namun secara nilai capaian tidak terdapat penurunan capaian. Pada tahun 2022 nilai capaian semua satuan kerja yang sudah tuntas tindak lanjutnya ataupun satuan kerja yang tidak ada temuan adalah sama yakni 100%. Pada tahun 2023 terjadi perbedaan dimana nilai capaian suatu satuan kerja yang menjadi uji petik Itjen dan sudah tuntas tindak lanjutnya adalah 100% serta nilai capaian suatu satuan kerja yang tidak ada temuan adalah sama dengan target kinerja yang ditetapkan yakni 75%.

Keberhasilan atas pencapaian indikator ini adalah tidak adanya temuan pada Pusat Riset Kelautan pada triwulan I Tahun 2023, sesuai surat penyampaian

dari BRSDM Nomor B.1962/BRSDM.1/HP.510/IV/2023 tanggal 12 April 2023 perihal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2023 Lingkup BRSDMKP”

Kegiatan pendukung yang menunjang tercapainya IKU ini adalah pengendalian intern terhadap faktor-faktor yang mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan antara lain komitmen pimpinan dalam percepatan penyelesaian temuan serta inisiasi kegiatan seperti tindak lanjut temuan dengan melakukan pendampingan ke satuan kerja dan kegiatan tindak lanjut temuan yang diadakan secara regional dengan melibatkan Tim ITJEN KKP.

IKU 12: Unit kerja Pusat Riset Kelautan yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit)

Belum terdapat capaian kinerja pada IKU ini, capaian baru dapat diukur pada triwulan IV.

IKU 13: Nilai IKPA satker Pusat Riset Perikanan

Belum terdapat capaian kinerja pada IKU ini, capaian baru dapat diukur pada triwulan berikutnya.

IKU 14: Nilai Kinerja Anggaran satker Pusat Riset Perikanan

Belum terdapat capaian kinerja pada IKU ini, capaian baru dapat diukur pada triwulan IV.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2023

Penyerapan anggaran lingkup Pusat Riset Kelautan Triwulan I Tahun 2023 data per tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp. 4.200.313.624,- dari pagu anggaran Rp. 33.650.000.000,- dengan persentase sebesar 12,48%, rincian realisasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12. Rincian Realisasi Anggaran Pusriskel Tahun 2023

Satuan Kerja (Satker)	Pagu (Rp)	Realisasi	
		Rp.	%
Pusriskel	22,687,649,000	2,563,307,364	11.30%
LRSDKP	6,429,852,000	901,267,694	14.02%
LPTK	4,532,499,000	625,724,927	13.81%
TOTAL	33,650,000,000	4,090,299,985	12.16%

Secara umum kinerja Pusat Riset Kelautan pada Triwulan I Tahun 2023 belum maksimal hal ini terlihat dari capaian realisasi anggaran yang masih dibawah 20%, dikarenakan adanya blokir anggaran belanja modal dan kegiatan Perumusan Kebijakan Kelautan Dan Perikanan, serta belum terlaksananya seluruh kegiatan berdasarkan POK. Realisasi anggaran per IKU dapat dilihat pada lampiran sedangkan realisasi anggaran per Sasaran Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13. Rincian Realisasi Per Sasaran Kegiatan Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN		Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran Per 31 Maret (Rp.)	%
1.	Tersedianya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP	2.350.000.000	0	0
2.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan	450.000.000	0	0
3.	Tatakelola Pemerintahan yang Baik pada Pusat Riset Kelautan	30.850.000.000	4,090,299,985	12.16
TOTAL		33.650.000.000	4,090,299,985	12.16

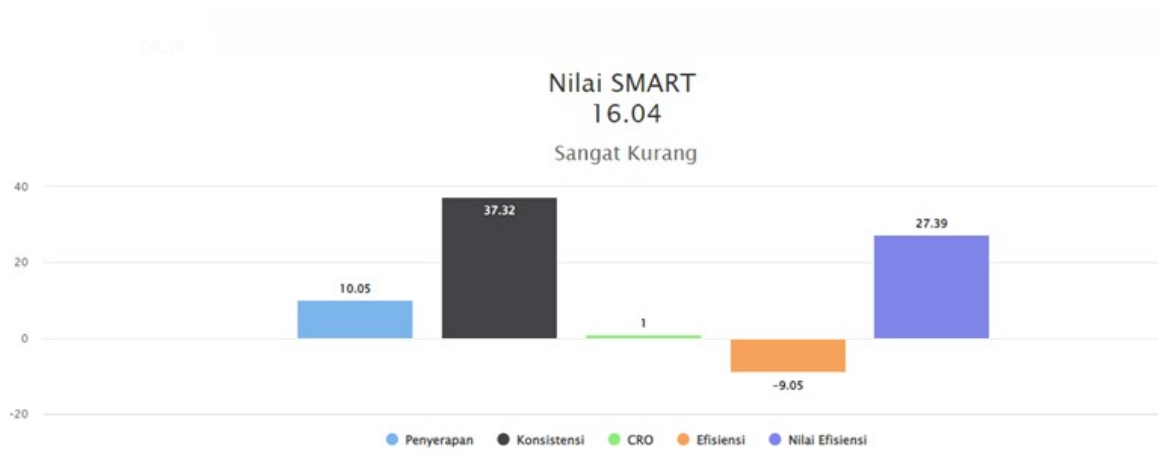
D. EFISIENSI ANGGARAN DAN ALOKASI SUMBER DAYA

Pusat Riset Kelautan merupakan satuan kerja di bawah Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Modal berupa anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan untuk mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, disamping itu anggaran dipergunakan juga sebagai alat perencana untuk mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, disamping itu anggaran dipergunakan juga sebagai alat pengendalian untuk mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga disebutkan bahwa evaluasi kinerja anggaran terdiri atas evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi, evaluasi kinerja anggaran atas aspek manfaat dan evaluasi kinerja atas aspek konteks. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilaksanakan untuk kinerja anggaran tingkat eselon I/program dan tingkat satuan kerja/kegiatan. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel: capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Nilai efisiensi tertinggi adalah 20% (dua puluh persen) dan nilai terendah adalah -20 % (minus dua puluh persen). Perhitungan efisiensi anggaran Pusat Riset Kelautan yang masuk dalam DIPA Pusat Riset Perikanan (satu DIPA) telah tersedia berbasis sistem dan dikembangkan oleh Kementerian Keuangan RI melalui aplikasi SmartDJA, yang

dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar 8. Nilai Efisiensi anggaran Triwulan I Tahun 2023

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat nilai kinerja anggaran Pusriskan memiliki nilai 16,04 dengan kategori Sangat Kurang. Dengan penyerapan 10,05%, konsistensi 37,32%, capaian rincian output (CRO) 1,00%, efisiensi -9,05%, dan nilai efisiensi 27,39%. Selain itu, terdapat 4 (empat) alur tahapan untuk mencapai efisiensi anggaran dan sumber daya pada Pusriskan yaitu; perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, serta penyesuaian. Efisiensi tersebut merupakan hasil evaluasi anggaran dan sumber daya yang akan didapatkan setelah melalui reviu anggaran maupun kinerja. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 Pusriskan belum melakukan revisi anggaran.

BAB IV PENUTUP

A. CAPAIAN KINERJA UTAMA

**B. PERMASALAHAN
REKOMENDASI**

&

A. CAPAIAN KINERJA UTAMA

Berdasarkan hasil pengukuran Aplikasi Kinerja Triwulan I Tahun 2023, pada Pusat Riset Kelautan memiliki kinerja yang baik dengan nilai 103,26%. Pengukuran capaian kinerja Pusat Riset Kelautan tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *Balanced Score Card* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Capaian kinerja telah memenuhi target yang telah ditetapkan dengan indikator capaian berwarna hijau.

Dari hasil pengukuran kinerja Pusat Riset Kelautan pada Triwulan I Tahun 2023 terdapat 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah memiliki capaian sebagai berikut:

Tabel 14. Capaian Kinerja Pusriskel Triwulan I Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA		Target		Realisasi	
		2023	TW I	TW I	%
1.	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP lingkup Pusat Riset Kelautan (NSPK)	7	-	-	-
2.	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP Lingkup Pusat Riset Kelautan (unit)	3	-	-	-
3.	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Riset Kelautan (Rupiah Juta)	8,5	-	-	-
4.	Kerjasama/Kemitraan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang disepakati (naskah Kerjasama)	3	-	-	-
5.	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%)	100	100	100	100,00
6.	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Kelautan dibandingkan Realisasi Anggaran Pusat Riset Kelautan TA 2022 (%)	≤ 0,5	-	-	-
7.	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Kelautan (Indeks)	78	-	-	-
8.	Nilai PM SAKIP Pusat Riset Kelautan (nilai)	75	-	-	-
9.	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Kelautan (nilai)	192	-	-	-
10.	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Riset Kelautan (%)	92	92	100	108,70
11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Pusat Riset Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75	75	75	100,00
12.	Unit Kerja Pusat Riset Kelautan yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit kerja)	1	-	-	-
13.	Nilai IKPA satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	89	-	-	-
14.	Nilai Kinerja Anggaran Satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	82	-	-	-

B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

Secara umum kinerja Pusat Riset Kelautan cukup baik, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perbaikan-perbaikan. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan tentu dijumpai permasalahan dan membutuhkan langkah tindak lanjut segera untuk mengatasinya. Beberapa kendala/permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan Pusat Riset Kelautan dan tindak lanjut yang diperlukan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 15. Permasalahan dan Rekomendasi

No.	Permasalahan	Rekomendasi
1.	Adanya peralihan ke mekanisme sistem kerja baru terkait Kelompok Kerja mengakibatkan belum optimalnya penyampaian data dukung kinerja oleh penanggungjawab IKU terhadap target waktu yang ditetapkan	Melakukan sosialisasi mekanisme sistem kerja baru kepada para Penanggungjawab IKU dan anggota pelaksana kegiatan mengenai uraian tugas dan tanggung jawabnya serta meminta para Penanggung jawab IKU agar dapat menyampaikan bahan dan data dukung capaian kinerja tepat waktu
2.	Belum semua IKU memiliki kegiatan pendukung dan alokasi anggaran dalam dokumen RKAKL	Melakukan revisi RKAKL dengan memasukkan kegiatan pendukung tercapainya IKU dan alokasi anggarannya

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN PUSAT RISET KELAUTAN

JALAN PASIR PUTIH II LANTAI IV ANCOL TIMUR JAKARTA 14430
TELEPON (021) 64711583 (LACAK), FAKSIMILE (021) 64711685
LAMAM www.kkp.go.id EMAIL pusriskel@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 PUSAT RISET KELAUTAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Yayan Hikmayani**
Jabatan : Plt. Kepala Pusat Riset Kelautan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **I Nyoman Radiarta**
Jabatan : Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 9 Januari 2023

Pihak Kedua
Kepala Badan Riset dan
Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan


I Nyoman Radiarta

Pihak Pertama
Plt. Kepala Pusat Riset
Kelautan


Yayan Hikmayani

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PUSAT RISET KELAUTAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tersedianya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP	1	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP Lingkup Pusat Riset Kelautan (NSPK)	7
2	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan	2	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP Lingkup Pusat Riset Kelautan (unit)	3
3	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pusat Riset Kelautan	3	Nilai PNBPN Satker Lingkup Pusat Riset Kelautan (Rupiah Juta)	8,5
		4	Kerjasama/Kemitraan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang disepakati (naskah Kerjasama)	3
		5	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%)	100
		6	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Kelautan dibandingkan Realisasi Anggaran Pusat Riset Kelautan TA 2022 (%)	≤ 0,5
		7	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Kelautan (indeks)	78
		8	Nilai PM SAKIP Pusat Riset Kelautan (nilai)	75
		9	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Kelautan (nilai)	92
		10	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Riset Kelautan (%)	92
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Pusat Riset Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75
		12	Unit Kerja Pusat Riset Kelautan yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit)	1
		13	Nilai IKPA satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	89
		14	Nilai Kinerja Anggaran Satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	82

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	<i>Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan</i>	2.800.000.000
2	<i>Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan</i>	30.850.000.000
TOTAL ANGGARAN PUSAT RISET KELAUTAN TAHUN 2023		33.650.000.000

Jakarta, 9 Januari 2023

Pihak Kedua
Kepala Badan Riset dan
Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan

I Nyoman Radiarta

Pihak Pertama
Plt. Kepala Pusat Riset
Kelautan

Yayan Hikmayani

Surat Perintah Tim Penyusun LKJ Tahun 2023



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN PASIR PUTIH II ANCOL TIMUR JAKARTA 14430
TELEPON (021) 64711583 (LACAK), FAKSIMILE (021) 64711685
LAMAN www.kkp.go.id

SURAT PERINTAH
PLT. KEPALA PUSAT RISET KELAUTAN
NOMOR :B.266/BRSDM.2/TU.110/III/2023

TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKj)
PUSAT RISET KELAUTAN
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PLT. KEPALA PUSAT RISET KELAUTAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terselenggaranya *good governance* dan *clean governance* dalam rangka tata pemerintahan yang baik sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara maka perlu adanya Laporan Kinerja (LKj) Triwulan dan Tahunan.
 - b. bahwa berdasar pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Surat Perintah Plt. Kepala Pusat Riset Kelautan tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Pusat Riset Kelautan Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP.

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT PERINTAH PLT. KEPALA PUSAT RISET KELAUTAN TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKj) PUSAT RISET KELAUTAN TAHUN 2023
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Kepala Pusat Riset Kelautan Tahun 2023 terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini,
- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Pusat Riset Kelautan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. Penanggung Jawab :
Memberikan pembinaan terhadap kegiatan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pusat Riset Kelautan Tahun 2023;
 2. Ketua :
Memberikan arahan terhadap kegiatan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pusat Riset Kelautan Tahun 2023;

3. Sekretaris :

Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pusat Riset Kelautan Tahun 2023;

4. Anggota :

Menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan serta menyusun Laporan Kinerja (LKj) Pusat Riset Kelautan Tahun 2023.

KETIGA Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Pusat Riset Kelautan Tahun 2023, bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Riset Kelautan.

KEEMPAT Masa kerja berlaku Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Pusat Riset Kelautan Tahun 2023 sebagaimana diktum PERTAMA selama 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan keputusan ini.

KELIMA Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pusat Riset Perikanan Tahun 2023 Nomor SP DIPA 032.12.403821/2023 Tanggal 30 November 2022.

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Maret 2023

PLT KEPALA PUSAT RISET KELAUTAN



YAYAN LIK MAYANI

LAMPIRAN : Surat Perintah PLT. Kepala Pusat Riset Kelautan Tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Pusat Riset Kelautan Tahun 2023

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKj)
PUSAT RISET KELAUTAN
TAHUN 2023**

Penanggung Jawab : Plt. Kepala Pusat Riset Kelautan
Ketua : Dr. Ifan Ridlho Suhelmi, M.Si.
Sekretaris : Joko Hardono, S.Si, ME.
Anggota : Erish Widjanarko, S.T.
Triyono, S.Si, M.T.
Theresia Lolita N., M.Si.
Nia Naelul Hasanah R., M. Soc.,Sc.
Efi Noferya, S.Pi.
Rais Rozali, S.H, M.H.
Arid Ahmad Ridwan, SE.
Yulhendri Suryansyah, S.Pi, M.Si
Dr. Niken F. Gusmawati, M.Si.
Dra. Yayah Shobariyah
Drs. B. Realino S, M.Si.
Falia Maumentia, LL.M.
Cecep Ahmad H, S.T, M.Eng.
M. Hikmat Jayawiguna, S.St.Pi, M.Si.
Sitti Khadijah Nurhappy, S.Pi, M.T.
Donal Daniel, S.T, M.T.
R. Tri Anggono T. Pranoto, A.Md.
Adi Darmawan, S.Kom.
Sari Novita, S.T.
Utami Retno Kadarwati, M.Sc.
Megananda, SE

PLT. KEPALA PUSAT RISET KELAUTAN



Realisasi Anggaran Per IKU Pusat Riset Kelautan

Per 31 Maret 2023

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase (%)
1.	Tersedianya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP	1 Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP lingkup Pusat Riset Kelautan (NSPK)	2,350,000,000	-	0.00%
2.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan	2 Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP Lingkup Pusat Riset Kelautan (unit)	450,000,000	-	0.00%
3.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pusat Riset Kelautan	3 Nilai PNBPsatker Lingkup Pusat Riset Kelautan (Rupiah Juta)	139,858,000	300,000	0.21%
		4 Kerjasama/Kemitraan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang disepakati (naskah Kerjasama)	106,788,000	21,569,470	20.20%
		5 Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%)	29,707,854,000	3,863,358,289	13.00%
		6 Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Kelautan dibandingkan Realisasi Anggaran Pusat Riset Kelautan TA	98,428,000	49,182,618	49.97%

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase (%)
		2022 (%)			
7		Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Kelautan (Indeks)	145,000,000	27,675,605	19.09%
8		Nilai PM SAKIP Pusat Riset Kelautan (nilai)	261,800,000	55,098,578	21.05%
9		Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Kelautan (nilai)	59,380,000	24,247,312	40.83%
10		Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Riset Kelautan (%)	75,500,000	2,690,000	3.56%
11		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Pusat Riset Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	29,572,000	7,819,589	26.44%
12		Unit Kerja Pusat Riset Kelautan yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit kerja)	75,000,000	785,500	1.05%
13		Nilai IKPA satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	77,000,000	17,534,692	22.77%
14		Nilai Kinerja Anggaran Satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	73,820,000	20,038,332	27.14%
TOTAL			33,650,000,000	4,090,299,985	12.16%



PUSAT RISET KELAUTAN



**Jalan Pasir Putih II Ancol Timur
Jakarta 14430
Telepon (021) 64711583, Faksimile (021) 64711685
LAMAM www.kkp.go.id**



LAPORAN KINERJA PUSAT RISET KELAUTAN

TRIWULAN I
2023



PUSAT RISET KELAUTAN
BADAN RISET DAN SUMBERDAYA MANUSIA

Puji dan Syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, karena atas Izin dan Rahmat-Nya penyusunan "Laporan Kinerja Pusat Riset Kelautan Triwulan I Tahun 2023" dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Pusat Riset Kelautan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka terselenggaranya *good governance*.

Laporan ini menyajikan kinerja organisasi Pusat Riset Kelautan selama Triwulan I Tahun 2023. Metode penyajian kinerja mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja ini memberikan informasi capaian kinerja Pusat Riset Kelautan pada Triwulan I Tahun 2023 dan diharapkan menjadi bahan perbaikan bagi Pusat Riset Kelautan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya pada periode berikutnya. Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Pusat Riset Kelautan - BRSDM telah menerapkan metode pengukuran kinerja berbasis *Balanced Score Card* (BSC). Kinerja Pusat Riset Kelautan diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Pusat Riset Kelautan Tahun 2023 yang merupakan kontrak kinerja tahunan.

Selanjutnya, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh atas capaian kinerja Level 2 Pusat Riset Kelautan Triwulan I Tahun 2023 yang meliputi capaian kinerja kegiatan lingkup Pusat Riset Kelautan. Capaian kinerja tersebut dikontribusi oleh 3 satuan kerja (satker) yang berada di lingkup Pusriskel yaitu satker Pusriskel, satker Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) – Bungus, dan satker Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LPTK) – Wakatobi.

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kontribusi dan sumbangsih semua pihak yang turut mendukung pencapaian

Laporan Kinerja Pusriskel Triwulan I Tahun 2023

kinerja Pusat Riset Kelautan pada Triwulan I Tahun 2023. Akhirnya, semoga laporan ini memberikan manfaat dan digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan dan tahun berikutnya.

Jakarta, 18 April 2023

Kepala Pusat Riset Kelautan

Ditandatangani
secara elektronik

Hendra Yusran Siry

Daftar Isi

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	4
Daftar Gambar	5
Daftar Tabel	6
Ringkasan Eksekutif.....	7
BAB I PENDAHULUAN.....	9
A. <i>Latar Belakang</i>	<i>10</i>
B. <i>Tugas, Fungsi, & Struktur Organisasi</i>	<i>13</i>
C. <i>Keragaan Sumber Daya Manusia (SDM).....</i>	<i>17</i>
D. <i>Sistematika Laporan Kinerja (LKj).....</i>	<i>18</i>
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
A. <i>Rencana Strategis Pusriskel 2020-2024</i>	<i>21</i>
B. <i>Potensi dan Permasalahan.....</i>	<i>25</i>
C. <i>Rencana Kerja Tahunan 2023.....</i>	<i>27</i>
D. <i>Perjanjian Kinerja Tahun 2023</i>	<i>29</i>
E. <i>Pengukuran Kinerja</i>	<i>30</i>
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	33
A. <i>Prestasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023</i>	<i>34</i>
B. <i>Evaluasi dan Analisis Kinerja</i>	<i>34</i>
C. <i>Akuntabilitas Keuangan Tahun 2023</i>	<i>41</i>
D. <i>Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya</i>	<i>43</i>
BAB IV PENUTUP	45
A. <i>Capaian Kinerja Utama</i>	<i>46</i>
B. <i>Permasalahan dan Rekomendasi.....</i>	<i>47</i>
LAMPIRAN	48

Daftar Gambar

Gambar 1. Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024.....	11
Gambar 2. Sebaran Pegawai berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan	18
Gambar 3. Satker UPT Pusriskel.....	26
Gambar 4. Pagu Anggaran Lingkup Pusriskel Tahun 2023.....	28
Gambar 5. Postur Anggaran Pusriskel Tahun 2023.....	28
Gambar 6. Indeks Capaian IKU	31
Gambar 7. Nilai Capaian Kinerja Pusriskel tahun 2023	34
Gambar 8. Nilai Efisiensi anggaran Triwulan I Tahun 2023	44

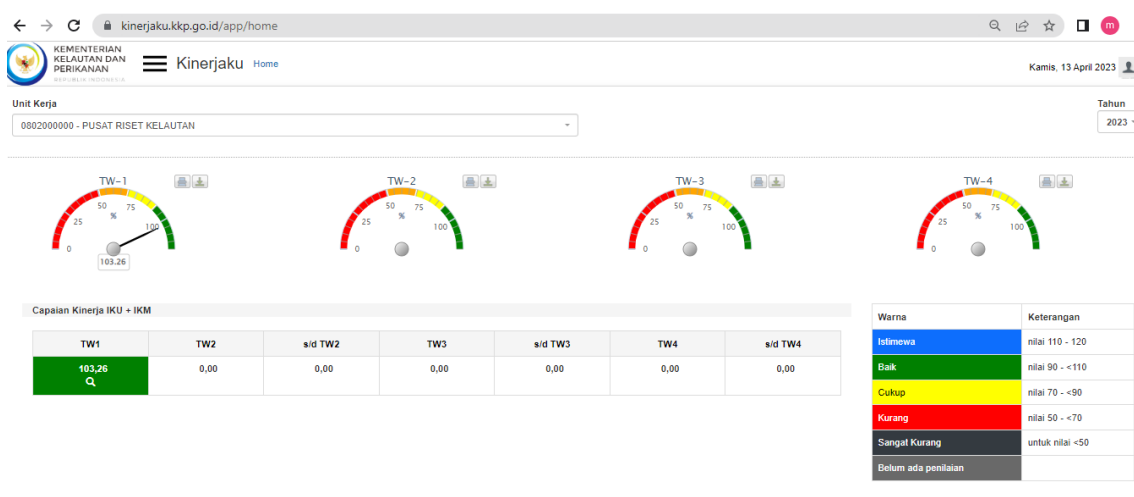
Daftar Tabel

Tabel 1. Distribusi Pegawai Lingkup Pusat Riset Kelautan.....	17
Tabel 2. Sasaran Kegiatan Pusriskel.....	22
Tabel 3. Rencana Kinerja Tahunan Pusat Riset Kelautan Tahun 2023.....	22
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Pusat Riset Kelautan Tahun 2023	29
Tabel 5. Sistem Pembobotan Atas Tingkat Validasi IKU.....	32
Tabel 6. Nilai Indeks Status Capaian NPSS	32
Tabel 7. Standar Status Kinerja NPSS.....	32
Tabel 8. Target dan Capaian Kinerja Pusat Riset Kelautan Triwulan I Tahun 2023	35
Tabel 9. Capaian IKU Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%).....	37
Tabel 10. Capaian IKU Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Riset Kelautan (%) ..	39
Tabel 11. Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Pusat Riset Kelautan yang Dokumen Tindaklanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	40
Tabel 12. Rincian Realisasi Anggaran Pusriskel Tahun 2023	42
Tabel 13. Rincian Realisasi Per Sasaran Kegiatan Tahun 2023.....	42
Tabel 14. Capaian Kinerja Pusriskel Triwulan I Tahun 2023	46
Tabel 15. Permasalahan dan Rekomendasi	47

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Riset Kelautan (Pusriskel) ini bertujuan untuk memberikan informasi kinerja Pusriskel yang terukur atas capaian kerjanya pada Triwulan I Tahun 2023 dan menjadi bahan perbaikan bagi Pusriskel dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kerjanya pada periode berikutnya.

Pengukuran capaian kinerja Pusat Riset Kelautan Triwulan I Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *Balanced ScoreCard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu aplikasi Kinerjaku pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja pada aplikasi tersebut diperoleh nilai capaian kinerja Pusriskel pada Triwulan I Tahun 2023 adalah sebesar 103,26% dengan 3 IKU yang telah memiliki capaian kinerja sebagai berikut:



INDIKATOR KINERJA		Target		Realisasi	
		2023	TW I	TW I	%
1.	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP lingkup Pusat Riset Kelautan (NSPK)	7	-	-	-
2.	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP Lingkup Pusat Riset Kelautan (unit)	3	-	-	-
3.	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Riset Kelautan (Rupiah Juta)	8,5	-	-	-

INDIKATOR KINERJA		Target		Realisasi	
		2023	TW I	TW I	%
4.	Kerjasama/Kemitraan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang disepakati (naskah Kerjasama)	3	-	-	-
5.	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%)	100	100	100	100,00
6.	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Kelautan dibandingkan Realisasi Anggaran Pusat Riset Kelautan TA 2022 (%)	≤ 0,5	-	-	-
7.	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Kelautan (Indeks)	78	-	-	-
8.	Nilai PM SAKIP Pusat Riset Kelautan (nilai)	75	-	-	-
9.	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Kelautan (nilai)	192	-	-	-
10.	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Riset Kelautan (%)	92	92	100	108,70
11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Pusat Riset Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75	75	75	100,00
12.	Unit Kerja Pusat Riset Kelautan yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit kerja)	1	-	-	-
13.	Nilai IKPA satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	89	-	-	-
14.	Nilai Kinerja Anggaran Satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	82	-	-	-

Capaian kinerja Pusat Riset Kelautan selama Triwulan I Tahun 2023 sudah baik (diatas 100%) dan dicerminkan dengan indikator berwarna hijau. Namun dalam proses pencapaian kinerjanya terdapat beberapa permasalahan yang ikut mempengaruhi capaian kinerja dan telah dilakukan langkah-langkah sebagai solusi pemecahan masalahnya, diantaranya adalah:

No.	Permasalahan	Rekomendasi
1.	Adanya peralihan ke mekanisme sistem kerja baru terkait Kelompok Kerja mengakibatkan belum optimalnya penyampaian data dukung kinerja oleh penanggungjawab IKU terhadap target waktu yang ditetapkan	Melakukan sosialisasi mekanisme sistem kerja baru kepada para Penanggungjawab IKU dan anggota pelaksana kegiatan mengenai uraian tugas dan tanggung jawabnya serta meminta para Penanggung jawab IKU agar dapat menyampaikan bahan dan data dukung capaian kinerja tepat waktu
2.	Belum semua IKU memiliki kegiatan pendukung dan alokasi anggaran dalam dokumen RKAKL	Melakukan revisi RKAKL dengan memasukkan kegiatan pendukung tercapainya IKU dan alokasi anggarannya

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

**B. TUGAS, FUNGSI DAN
STRUKTUR ORGANISASI**

C. KERAGAAN SDM

**D. SISTEMATIKA
LAPORAN KINERJA**

A. LATAR BELAKANG

Dalam melaksanakan program dan kegiatan penelitian dan pengembangan IPTEK, Pusat Riset Kelautan (Pusriskel) sebagai salah satu unit kerja Eselon II di lingkungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, semakin dituntut untuk menyesuaikan dengan perubahan sistem manajemen Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berazaskan akuntabilitas, dimana setiap penyelenggara negara dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerja atau hasil-hasilnya dari seluruh program/kegiatan kepada masyarakat atas penggunaan dana dan kewenangan yang diberikan.

Penerapan akuntabilitas mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan peraturan tersebut, Pusat Riset Kelautan (Pusriskel) wajib melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Sebagai implementasi dari pelaksanaan prinsip akuntabilitas hasil penyelenggaraan kegiatan dan anggaran dimaksud maka Pusriskel menyusun Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja ini disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu pada Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai acuan dalam perencanaan kinerja diantaranya adalah Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2021- 2024 dan Rencana Strategis BRSDM Tahun 2021-2024.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi. Kelima arahan utama arahan Presiden tersebut

dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024.



Gambar 1. Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024

Tujuh Agenda Pembangunan:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan,
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan,
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing,
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar,
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim,
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah/ pemasar hasil perikanan kelautan, dan petambak garam, dan para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya. Untuk itu, pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024 akan menjabarkan agenda pembangunan nasional dan arahan-arahan Presiden tersebut ke dalam program-

program pembangunan antara lain untuk kesejahteraan masyarakat, penyerapan lapangan pekerjaan, dan peningkatan devisa negara.

Renstra KKP menjelaskan bahwa Visi KKP didasarkan pada visi Indonesia 2045, yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Visi Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden.

Visi dan Misi

Visi KKP 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Visi BRSDM pada Tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

Visi Pusriskel mengacu pada visi BRSDM dan KKP:

Visi *“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong”*

Misi Pusriskel adalah menjalankan misi Presiden, KKP dan BRSDM dalam bidang kelautan dan perikanan. Dari 9 (sembilan) misi Presiden, Pusriskel mendukung 4 (empat) misi yang merupakan modifikasi dari misi yang diemban oleh KKP dan BRSDM. Modifikasi dilakukan dengan penyesuaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusriskel, yaitu:

1. Misi Ke-1: Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan.
2. Misi ke-2: Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan terhadap Perekonomian Nasional melalui Hasil Riset Kelautan.
3. Misi ke-4: Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan.

4. Misi ke-8: Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Pusat Riset Kelautan.

Implementasi dari visi dan misi Presiden dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Pusat Riset Kelautan Triwulan I Tahun 2023 ini adalah:

1. Mengukur capaian kinerja IKU yang ingin dicapai melalui program kerja dan kegiatan terkait pada Triwulan I Tahun 2023;
2. Mengevaluasi dan menganalisis capaian kinerja IKU pada Triwulan I Tahun 2023;
3. Menyusun akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan pada Triwulan I Tahun 2023.

Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Riset Kelautan ini, bertujuan:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian kinerja Pusriskel pada Triwulan I Tahun 2023;
2. Menjadi bahan perbaikan bagi Pusriskel dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya pada periode berikutnya.

B. TUGAS, FUNGSI, & STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 159 dan 160 menyatakan bahwa Pusat Riset Kelautan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, Pusat Riset Kelautan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kewilayahan, mitigasi, adaptasi, dan konservasi kelautan, serta sumber daya laut;
- b. penyiapan pelaksanaan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kewilayahan, mitigasi, adaptasi, dan konservasi kelautan, serta sumber daya laut;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan riset kelautan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan pusat.

Untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi dan dalam menjalankan ketenaganukliran serta keantariksaan, Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). BRIN mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi, serta melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Bab VII tentang Pengintegrasian, Pasal 65 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan bahwa:

- (1) Tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan kementerian/lembaga dialihkan menjadi tugas, fungsi dan kewenangan BRIN.
- (2) Pengalihan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan pengalihan pegawai negeri sipil, perlengkapan, pembiayaan dan aset yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, dan menjadi pegawai negeri sipil, perlengkapan, pembiayaan dan aset BRIN.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan salah Kementerian/ Lembaga (K/L) yang menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewenangan penelitian, pengembangan dan penerapan beserta Sumber Daya Manusia, Aset dan Anggaran pendukungnya sebelum terbitnya Perpres Nomor 78 Tahun 2021.

Sebagai implementasi amanah Perpres Nomor 78 Tahun 2021 maka pada tahun 2022 KKP telah melakukan serangkaian langkah sebagai tindaklanjutnya. Beberapa langkah yang telah dilaksanakan oleh KKP diantaranya adalah:

1. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) sebagai sebuah unit kerja eselon I di lingkungan KKP sudah tidak menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewenangan terkait penelitian, pengembangan dan penerapan;
2. KKP melaksanakan serah terima alih status penggunaan Barang Milik Negara (BMN) dari BRSDMKP kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), pada Kamis, 27 Oktober 2022, di Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT), Denpasar, Bali;
3. Pengalihan SDM Riset KKP ke BRIN berjumlah 529 orang terdiri atas 367 orang peneliti, 81 orang perekayasa dan 81 orang teknisi litkayasa dan telah dilantik menjadi jabatan fungsional periset di BRIN. Khusus dari BRSDM, SDM yang pindah ke BRIN berjumlah 443 orang.
4. Pemindahan anggaran riset dan belanja pegawai ke BRIN.

Pusat Riset Kelautan (Pusriskel) sebagai salah satu unit kerja eselon II di lingkungan BRSDMKP, KKP pada tahun anggaran 2022 sudah tidak menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewenangan terkait penelitian, pengembangan dan penerapan. Pada bulan November 2022 Pusriskel telah memproses revisi DIPA ke-7 terkait pemindahan anggaran riset dan belanja pegawai ke BRIN. Oleh karenanya sejak tahun 2022, Pusriskel sudah tidak memiliki IKU terkait kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan.

Secara kelembagaan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, lingkup Pusriskel terdapat 3 (tiga) satuan kerja, yaitu 1) Pusat Riset Kelautan-Jakarta; dan 2) UPT (Unit Pelaksana Teknis) di Pusriskel, yakni 1) Loka Riset Sumberdaya Kerentanan Pesisir (LRSDKP)-Bungus, Sumatera Barat (PermenKP No. 28 Tahun 2020); dan 2) Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LPTK)-Wakatobi, Sulawesi Tenggara (PermenKP No. 85 Tahun 2020); serta Instalasi Pengelolaan Sumberdaya Air Laut (IPSAL)-Madura, Jawa Timur; Unit Rintisan Teknologi Kelautan (PIAMARI)-Pangandaran, Jawa Barat dan calon UPT MIAMARI-Morotai, Maluku Utara.

Untuk membantu penyelenggaraan tugas dan fungsi Pusat Riset Kelautan tersebut, maka Kepala Pusat Riset Kelautan telah mengeluarkan Surat Perintah Nomor B.4.1/BRSDM.2/KP.440/I/2023 tanggal 02 Januari 2023 untuk memberikan perintah melaksanakan tugas sebagai Ketua Kelompok Indikator

Kinerja Kegiatan, Penanggung Jawab IKK, dan Anggota, pada Pusat Riset Kelautan di samping jabatan fungsionalnya, yakni:

A. Kelompok Kerja Kegiatan Pelayanan Internal, mempunyai tugas:

1. Penyusunan Naskah NSPK, Penyusunan Karya Tulis Kedinasan terkait Kebijakan, Penyusunan Karya Tulis Ilmiah terkait Kebijakan.
2. Penatausahaan Pengadaan Barang/Jasa, Penyusunan Rencana PBJ (Dokumen KAK?RAB/HPS, Kontrak, BAST).
3. Pengelolaan Unit Rintisan (PIAMARI, MIAMARI, Lab. Pasar Minggu, Lombok, Saumlaki, Natuna), Pengelolaan Sarana Perkantoran (Ancol), Penyusunan RK BMN dan Laporan Pengadaan, Pengelolaan Persuratan dan Kearsipan, Penatausahaan Perjalanan Dinas dan Pertemuan Pimpinan serta Urusan Rumah tangga, Pengelolaan *Whistle Blower*, Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict Of Interest/ COI*), Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Penatalaksanaan SOP, Surat Keputusan, Surat Perintah, dan Naskah Akademik.
4. Pengelolaan Urusan SDM dan Pengelolaan IP ASN.

B. Kelompok Kerja Kegiatan Pelayanan Teknis, mempunyai tugas:

1. Penyusunan Proposal PNBPN, Pembinaan Penatalaksanaan PNBPN UPT, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PNBPN.
2. Inisiasi, telaah dokumen, dan evaluasi pelaksanaan kerjasama/ Kemitraan, Koordinasi pelaksanaan, penyusunan rencana kegiatan dan monitoring capaian output Kegiatan SFV.
3. Pengelolaan: Bitrix, Data dan Informasi, Jurnal, Sistem Informasi, Command Center, dan IGT Pengelolaan.
4. Pengelolaan Layanan Publik, Persiapan menuju WBK, Pendampingan Penerapan Pelayanan Publik, Pengelolaan Media Sosial, Podcast dan Website, Dokumentasi dan Peliputan Kegiatan, dan Pengelolaan PPID.

C. Kelompok Kerja Kegiatan Keuangan, mempunyai tugas:

1. Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN, Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN, dan Penyusunan Laporan SPIP berbasis MR.
2. Pengelolaan Revisi Anggaran, Penatausahaan Keuangan, Penatausahaan Kontraktual, Pembayaran Tagihan Kontraktual dan Non-Kontraktual, dan Pembayaran Belanja Pegawai.
3. Penyusunan Laporan Capaian Output, Penyusunan Laporan Serapan Anggaran, dan Input Aplikasi SMART-DJA.

D. Kelompok Kerja Kegiatan Perencanaan, mempunyai tugas:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Program, Anggaran, dan Kinerja serta Revisi Dokumen Perencanaan, Penilaian Mandiri SAKIP, Pemenuhan Dokumen SAKIP lainnya, dan Penyusunan Laporan Evaluasi SAKIP.
2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi, Penyusunan Laporan Kinerja, Pelaksanaan Rekonsiliasi Capaian Kinerja, Penilaian Mandiri Rekonsiliasi Kinerja, dan Pemenuhan Dokumen Rekonsiliasi kinerja lainnya.
3. Pemenuhan Dokumen Tindak Lanjut, Pendampingan Pelaksanaan pengawasan APIP, dan Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

C. KERAGAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Pada awal tahun 2023, perubahan keragaan pegawai yang terjadi adalah perubahan jabatan dari jabatan pelaksana ke jabatan fungsional, yang mengakibatkan berubahnya komposisi jabatan dan juga beralihnya pegawai ke luar satuan kerja Pusat Riset Kelautan. Sumber Daya Manusia (SDM) Lingkup Pusat Riset Kelautan pada Triwulan I Tahun 2023 total berjumlah 128 orang, yang terdiri dari 69 orang pegawai PNS dan 59 orang tenaga kontrak, dengan distribusi yang dapat dilihat dalam tabel berikut.

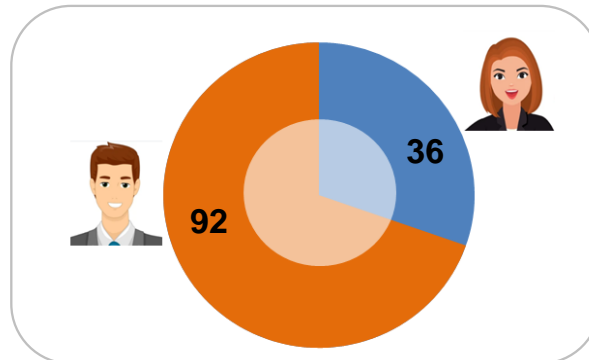
Sehubungan dengan perubahan data tersebut, distribusi pegawai pada Pusat Riset Kelautan dan UPT dibawahnya berdasarkan jenis kelamin, sebaran Pendidikan disampaikan dalam tabel dan gambar grafik dibawah ini:

Tabel 1. Distribusi Pegawai Lingkup Pusat Riset Kelautan

Jenis Kelamin Berdasarkan Satker dan Jenis Kepegawaian	PNS		KONTRAK		Jumlah
	L	P	L	P	
PRK	33	14	16	10	73
LRSDKP	10	4	16	3	33
LPTK	7	1	10	4	22
JUMLAH	50	19	42	17	128

Dari total 128 orang pegawai tersebut, terdapat satu orang pegawai yang berstatus dipekerjakan di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa sebaran gender pada pegawai lingkup Pusat

Riset Kelautan lebih didominasi oleh laki-laki sebanyak 92 orang pegawai, sedangkan perempuan sebanyak 36 orang pegawai.



Gambar 2. Sebaran Pegawai berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan

Dari data pegawai berdasarkan Pendidikan tersebut masih terdapat satu Pegawai yang sedang menjalankan tugas belajar, dan sembilan pegawai yang sedang menjalankan izin belajar. Tugas dan izin belajar tersebut nantinya akan meningkatkan kompetensi pegawai melalui Pendidikan.

D. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA (LKJ)

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sistematika penyajian laporan adalah sebagai berikut:

- **Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, dan capaian kinerja serta kendala selama Triwulan I Tahun 2023;

- **Bab I – Pendahuluan**, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang unit kerja Pusat Riset Kelautan seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di Pusat Riset Kelautan;
- **Bab II – Perencanaan Kinerja**, menyajikan rencana strategis Pusat Riset Kelautan pada TA 2020-2024, Rencana Kerja Tahunan dan penetapan kinerja tahunan Tahun 2022 serta pengukuran kinerja;
- **Bab III – Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan analisis terhadap capaian kinerja dan keuangan pada Triwulan I Tahun 2023:
 - a) Capaian Kinerja Organisasi
 - Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2022;
 - Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Triwulan I Tahun 2023 dengan Triwulan I Tahun 2022;
 - Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan standar nasional; (jika ada);
 - Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan;
 - Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya;
 - Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.
 - b) Realisasi Anggaran Pusat Riset Kelautan dan seluruh UPT.
- **Bab IV - Penutup**, menyajikan uraian singkat kesimpulan terhadap pencapaian kinerja di Triwulan I Tahun 2023 serta Permasalahan dan Rekomendasi.
- **Lampiran:**
 - a) Perjanjian Kinerja Pusriskel TA 2023;
 - b) Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. RENSTRA PUSRIS KEL 2020 -2024**
- B. RENCANA KERJA TAHUNAN 2023**
- C. PERJANJIAN KINERJA TA 2023**
- D. POTENSI & PERMASALAHAN**
- E. PENGUKURAN KINERJA**

A. RENCANA STRATEGIS PUSRISSEL 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 159 dan 160 menyatakan bahwa Pusat Riset Kelautan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Pusriskel berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada Rencana Strategis BRSDMKP Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis Badan Riset dan Sumber Daya Manusia dan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut Renstra BRSDM, adalah dokumen perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Rencana Strategis Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan (Renstra BRSDM) Tahun 2020 – 2024 sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan Riset dan Sumber Daya Manusia merupakan reviu Renstra Balitbang KP dan BPSDMP KP Tahun 2015 – 2019, sebagai turunan dari Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI (Permen KP) Nomor 25/PERMEN-KP/2015.

1. Tujuan

Sesuai dengan visi dan misi diatas, Pusat Riset Kelautan telah menetapkan rencana kinerja dan target kinerja yang akan dicapai pada tahun anggaran 2022. Sasaran dan tujuannya adalah:

- 1) Menyelenggarakan riset kelautan secara terpadu dengan tata kelola yang baik (*good governance*);
- 2) Mempercepat pemanfaatan hasil riset lingkup internal Pusriskel dan *stakeholder* strategis lainnya;
- 3) Meningkatkan kompetensi Riset SDM kelautan yang mampu meningkatkan, nilai tambah dan daya saing kelautan secara optimal.

2. Sasaran

Rencana strategis (Renstra) menyajikan sasaran kegiatan yang hendak dicapai, yang dapat diukur berdasarkan indikator kinerja yang ada. Berdasarkan Sasaran Kegiatan BRSDM KP, Pusat Riset Kelautan kemudian menindaklanjutinya

dengan menyusun Peta Strategi Level II Pusat Riset Kelautan TA 2023 dalam kerangka *Balance Score Card* (BSC), yang telah disepakati antara Plt. Kepala Pusat Riset Kelautan dengan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Peta strategi Pusat Riset Kelautan memetakan setiap Sasaran Kegiatan (SK) yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai visi dan misi yang diemban. Dengan menggunakan metodologi *Balance Score Card*, Sasaran Kegiatan (SK) Pusat Riset Kelautan dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2. Sasaran Kegiatan Pusriskel

SK 1	Tersedianya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP
SK 2	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan
SK 3	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Pusat Riset Kelautan

Selanjutnya target kinerja T.A 2023 tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan yang merupakan dokumen perencanaan yang mempresentasikan rencana dan janji untuk menargetkan kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimilikinya.

Tabel 3. Rencana Kinerja Tahunan Pusat Riset Kelautan Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2023
1.	Tersedianya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP	1.	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP lingkup Pusat Riset Kelautan (NSPK)	7
2.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan	2.	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP Lingkup Pusat Riset Kelautan (unit)	3
3.	Tatakelola Pemerintahan yang Baik pada Pusat Riset Kelautan	3.	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Riset Kelautan (Rupiah Juta)	8,5
		4.	Kerjasama/Kemitraan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang disepakati (naskah Kerjasama)	3
		5.	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%)	100
		6.	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Kelautan dibandingkan	≤ 0,5

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023
		Realisasi Anggaran Pusat Riset Kelautan TA 2022 (%)	
		7. Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Kelautan (Indeks)	78
		8. Nilai PM SAKIP Pusat Riset Kelautan (nilai)	75
		9. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Kelautan (nilai)	192
		10. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Riset Kelautan (%)	92
		11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Pusat Riset Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75
		12. Unit Kerja Pusat Riset Kelautan yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit kerja)	1
		13. Nilai IKPA satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	89
		14. Nilai Kinerja Anggaran Satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	82

Awal Tahun 2023, Pusat Riset Kelautan telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja antara Plt. Kepala Pusat Riset Kelautan dengan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM). Pada kontrak kinerja tersebut terdapat peta strategi (*strategy map*) dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai. Renstra Pusat Riset Kelautan Tahun 2020-2024 menjelaskan bahwa Sasaran Kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan melalui pelaksanaan program riset kelautan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Pusat Riset Kelautan sebagai suatu *outcome/impact* dari program yang dilaksanakan, dengan menggunakan pendekatan metode *Balanced Score Card* (BSC).

Peta strategi Pusat Riset Kelautan memetakan setiap Sasaran Kegiatan (SK) yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai visi dan misi yang diemban. Dengan menggunakan metodologi *Balance Score Card*, Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Pusat Riset Kelautan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. **Sasaran Kegiatan (SK) 1** dengan sasaran yang akan dicapai adalah **Tersedianya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP**, terdiri atas 1 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:
 - IKU 1: Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP lingkup Pusat Riset Kelautan (NSPK) dengan target 7. Merupakan nama IKU baru dari IKU Hasil perumusan kebijakan KP yang

digunakan untuk penyusunan kebijakan (Rekomendasi Kebijakan) dengan target 8 pada tahun 2022, namun dihapuskan karena alih fungsi Riset, dan target 7 pada tahun 2021.

2. **Sasaran Kegiatan (SK) 2**, dengan sasaran yang akan dicapai adalah **Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan**, terdiri atas 1 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

- IKU 2: Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP Lingkup Pusat Riset Kelautan (unit) dengan target 3, dan target 2 pada tahun 2022 (IKU Baru ditahun 2022).

3. **Sasaran Kegiatan (SK) 3**, dengan sasaran yang akan dicapai adalah **Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pusat Riset Kelautan**, terdiri atas 12 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

- IKU 3: Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Riset Kelautan (Rupiah Juta) dengan target 8,5 dan merupakan IKU baru di tahun 2023.
- IKU 4: Kerjasama/Kemitraan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang disepakati (naskah Kerjasama) dengan target 3, tidak ada IKU ini di tahun 2022, target 26 dengan nama IKU Jejaring dan/atau kerjasama riset Kelautan yang disepakati dan ditindaklanjuti pada tahun 2021, dan target 26 di tahun 2022.
- IKU 5: Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%), dengan target 100 setiap tahun selama 2021-2024.
- IKU 6: Batas Tertinggi Persentase Nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Kelautan (persen) dibandingkan Realisasi anggaran Pusat Riset Kelautan TA 2022 (%), dengan target tahun $\leq 0,5$, target ≤ 1 pada tahun 2022,2021 dan 2020.
- IKU 7: Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Kelautan (Indeks), dengan target 78, target 76 pada tahun 2022 dan target 73 pada tahun 2021 dan target 72 di tahun 2022.
- IKU 8: Nilai PM SAKIP Pusat Riset Kelautan dengan target 75 (merupakan IKU baru ditahun 2023).
- IKU 9: Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Kelautan (Nilai), dengan target tetap 92, target 92 pada tahun 2022, dan target 87 pada tahun 2021.
- IKU 10: Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Riset Kelautan (%), dengan target 92, target 86 pada tahun 2022, target 84 pada tahun 2021, dan target 82 di tahun 2020.

- IKU 11: Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang Dokumen Tindaklanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (persen), dengan target 75, target 70 pada tahun 2022, target 65 pada tahun 2021, dan target 60 di tahun 2020.
- IKU 12: Unit kerja Lingkup Pusat Riset Kelautan yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit) dengan target 1, merupakan IKU baru dengan target 1 pada tahun 2022.
- IKU 13: Nilai IKPA satker Pusat Riset Perikanan (nilai) dengan target 89, merupakan IKU baru ditahun 2023.
- IKU 14: Nilai Kinerja Anggaran Satker Pusat Riset Perikanan (nilai) dengan target 82, merupakan IKU baru ditahun 2023.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

a. Potensi

Pusriskel merupakan salah satu unit eselon II di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusat Riset Kelautan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Riset Kelautan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kewilayahan, mitigasi, adaptasi, dan konservasi kelautan, serta sumber daya laut;
- b. penyiapan pelaksanaan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kewilayahan, mitigasi, adaptasi, dan konservasi kelautan, serta sumber daya laut;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan riset kelautan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan pusat.



Gambar 3. Satker UPT Pusriskel

Cakupan organisasi Pusriskel meliputi: 1) Pusat Riset Kelautan; 2) Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir; 3) Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan; dan 4) Kelompok Jabatan Fungsional. Disamping itu juga terdapat 2 Instalasi (Instalasi Pengolahan Sumberdaya Air Laut Pamekasan dan Instalasi Laboratorium SATREPS Pasar Minggu) dan 1 Unit Ritisasi (PIAMARI Pangandaran), serta masih ada 1 calon UPT yaitu MIAMARI Morotai.

Pada awal tahun 2023, perubahan keragaan pegawai yang terjadi adalah perubahan jabatan dari jabatan pelaksana ke jabatan fungsional, yang mengakibatkan berubahnya komposisi jabatan dan juga beralihnya pegawai ke luar satuan kerja Pusat Riset Kelautan. Sumber Daya Manusia (SDM) Lingkup Pusat Riset Kelautan pada Triwulan I Tahun 2023 total berjumlah 128 orang, yang terdiri dari 69 orang pegawai PNS dan 59 orang tenaga kontrak.

Disamping itu, Pusat Riset Kelautan juga didukung oleh adanya bengkel/workshop mekanikal, material, modeling, mekatronika serta *Authomatic Identification System* (AIS), Aquarium sebagai bank coral dan ikan air, dan laboratorium pengembangan produk garam yang cukup lengkap.

b. Permasalahan

Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan antara lain:

- 1) Pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional mengakibatkan beberapa hal antara lain:
 - a. Seluruh sumberdaya riset, baik sumber daya manusi, anggaran dan program riset berpindah ke BRIN;
 - b. Pusat Riset Kelautan tidak memiliki Tugas Pokok dan Fungsi Riset lagi;
 - c. Pusat Riset beum bisa mengusulkan program dan kegiatan baru menunggu terbentuknya organisasi baru;
 - d. Program dan anggaran yang dapat dilaksanakan adalah kegiatan rutin perkantoran berupa dukungan manajemen;
- 2) Belum optimalnya kolaborasi pemanfaatan hasil riset dan pengembangan SDM untuk memperkuat capaian output dan sasaran kinerja kementerian serta merespon isu SDM dan riset nasional, regional, dan Internasional;
- 3) Kurang optimalnya kerjasama dalam dan luar negeri jejaring kerjasama (instansi pemerintah, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat/ LSM dalam dan luar negeri, serta dunia usaha dan industri (DUDI)) untuk meningkatkan kapasitas riset dan SDM KP yang dapat membuka peluang terhadap pemanfaatan bersama aset/sumber daya (*resource sharing*);
- 4) Pemanfaatan aset dan sarana prasarana eks-riset belum optimal;
- 5) Belum tersedianya regulasi pendukung serta terbatasnya kemampuan melakukan hilirisasi dan komersialisasi hasil riset terdahulu untuk kebutuhan industri.

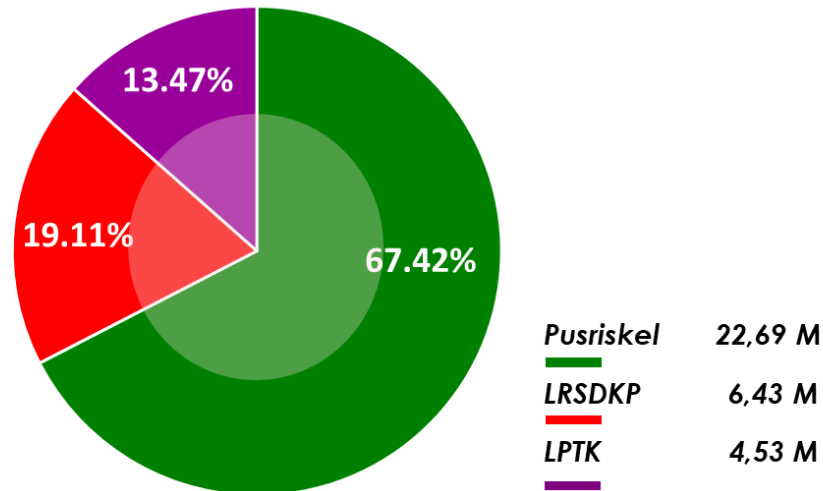
C. RENCANA KERJA TAHUNAN 2023

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran kegiatan, maka Rencana Kerja Pusat Riset Kelautan Tahun 2023 menetapkan 1 program yaitu Program Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dengan pagu anggaran Rp. 33.650.000.000,- dengan rincian kegiatan:

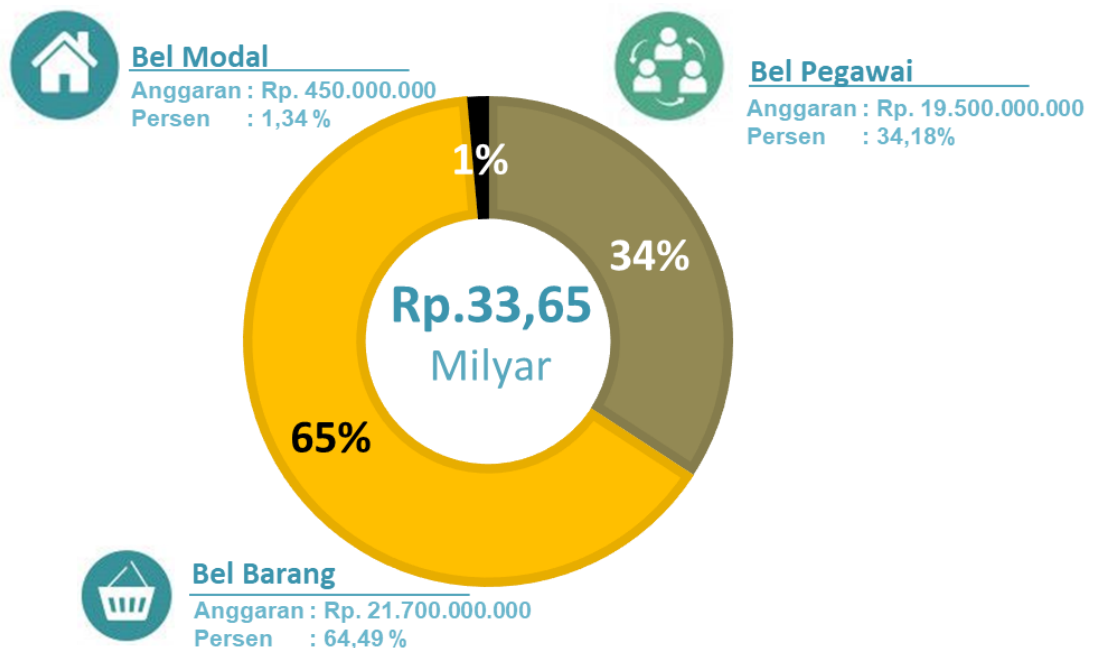
- 1) Hasil Perumusan Kebijakan, pagu sebesar Rp. 2.800.000.000,-
- 2) Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, pagu sebesar Rp. 30.850.000.000,-

Rincian anggaran Pusat Riset Kelautan dan masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah sebagai berikut

1. Pusat Riset Kelautan sebesar Rp. 22.687.649.000,-
2. Loka Sumber Daya Kerentanan Pesisir sebesar Rp. 6.429.852.000,-
3. Loka Perencanaan teknologi Kelautan sebesar Rp. 4.532.499.000,-



Gambar 4. Pagu Anggaran Lingkup Pusriskel Tahun 2023



Gambar 5. Postur Anggaran Pusriskel Tahun 2023.

Berdasarkan postur anggaran Lingkup Pusriskel terlihat bahwa jenis belanja paling besar dialokasikan untuk Belanja Barang sebesar Rp. 21.700.000.000,- atau 64,49%; Belanja Pegawai dari sebesar Rp. 11.500.000.000,- atau 34,18% dan Belanja Modal sebesar Rp. 450.000.000,- atau 1,34%.

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala Pusat Riset Kelautan kepada Koordinator dan jabatan fungsional lingkup Pusat Riset Kelautan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan sasaran kegiatan dan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai tolak ukur dan dasar evaluasi kinerja, serta sebagai dasar penilaian kegagalan/keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Perjanjian Kinerja Pusat Riset Kelautan Tahun 2023 telah ditandatangani oleh Plt. Kepala Pusat Riset Kelautan dan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) pada Januari 2023, sebagai berikut:

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Pusat Riset Kelautan Tahun 2023


SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2023
1.	Tersedianya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP	1.	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP lingkup Pusat Riset Kelautan (NSPK)	7
2.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan	2.	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP Lingkup Pusat Riset Kelautan (unit)	3
3.	Tatakelola Pemerintahan yang Baik pada Pusat Riset Kelautan	3.	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Riset Kelautan (Rupiah Juta)	8,5
		4.	Kerjasama/Kemitraan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang disepakati (naskah Kerjasama)	3
		5.	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%)	100
		7.	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Kelautan (Indeks)	78
		6.	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Kelautan dibandingkan Realisasi Anggaran Pusat Riset Kelautan TA 2022 (%)	≤ 0,5
		8.	Nilai PM SAKIP Pusat Riset Kelautan (nilai)	75
		9.	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Kelautan (nilai)	192
		10.	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Riset Kelautan (%)	92

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2023
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Pusat Riset Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75
		12.	Unit Kerja Pusat Riset Kelautan yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit kerja)	1
		13.	Nilai IKPA satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	89
		14.	Nilai Kinerja Anggaran Satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	82

E. PENGUKURAN KINERJA

a. Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja Pusriskel Tahun 2023, dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasinya, dengan rumus pengukuran sebagai berikut:.



$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dengan membandingkan antara realisasi dan rencana, maka dapat dilihat jumlah persentase capaian pada masing-masing indikator kinerja, dan akan diperoleh indeks capaian IKU.

Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;

Adapun status Indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:



Gambar 6. Indeks Capaian IKU

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing-masing Indikator yang ada dalam dokumen *Balanced Scores Card* (BSC).

b. Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja lingkup BRSDM dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengukuran, telah ditugaskan kepada Tim SAKIP dan Penyusun Laporan Kinerja lingkup Pusat Riset Kelautan yang ditetapkan melalui ditetapkan Surat Perintah Plt. Kepala Pusat Riset Kelautan Nomor: B.266/BRSDM.2/TU.110/III/2023 tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Pusat Riset Kelautan 2023.

Keanggotaan Tim SAKIP dan Penyusun Laporan Kinerja terdiri dari Kepala Staker UPT, Ketua Kelompok Kerja, Penanggung Jawab IKK dan staf Pusat Riset Kelautan. Dalam pelaksanaannya, capaian kinerja triwulanan dipantau oleh Tim SAKIP dan Penyusun Laporan Kinerja yang menjadi penanggung jawab kegiatan, selanjutnya penanggung jawab kegiatan melaporkannya kepada Kepala Pusat Riset Kelautan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan strategis pada peta strategi yang dituangkan pada penetapan kinerja Tahun 2023 dapat tercapai.

Pengukuran kinerja Pusat Riset Kelautan pada Triwulan I Tahun 2023 mengacu pada hasil pengukuran yang telah ditetapkan dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan alamat

website: <http://kinerjaku.kkp.go.id/2023>. Penilaian pencapaian sasaran diukur berdasarkan Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSS).

NPSS adalah nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh IKU di dalam satu Sasaran Kegiatan (SK). Status capaian SK yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau (buruk/sedang/baik) ditentukan oleh NPSS. Untuk menghitung NPSS perlu diperhatikan bobot masing-masing IKU terhadap SK tersebut dengan indeks toleransi 0%. Sistem pembobotan yang digunakan didasarkan atas tingkat validitas IKU sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. Sistem Pembobotan Atas Tingkat Validasi IKU

No.	Validitas IKU	Bobot
1.	Lead Input	0,1
2.	Lead Proses	0,2
3.	Lag output	0,3
4.	Lag Outcome	0,4

Tabel 6. Nilai Indeks Status Capaian NPSS

Baik	Sedang	Buruk
Indeks Capaian >100 %	Indeks Capaian =100%	Indeks Capaian < 100 %

Untuk melakukan pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menentukan dan menyepakati standar status kinerja NPSS sesuai dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 7. Standar Status Kinerja NPSS

KLASIFIKASI			STATUS NPSS (Toleransi 0%)
MAXIMIZE	MINIMIZE	STABILIZE	
X<100%	X>100%	X>100% atau X<100%	Buruk
X=100%	X=100%	-	Sedang
X≥100%	X≤100%	X=100%	Baik

Dalam melakukan pengukuran kinerja harus menentukan klasifikasi target indikator kinerja diantaranya adalah: *Maximize* adalah semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; *Minimize* adalah semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; *Stabilize* adalah semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

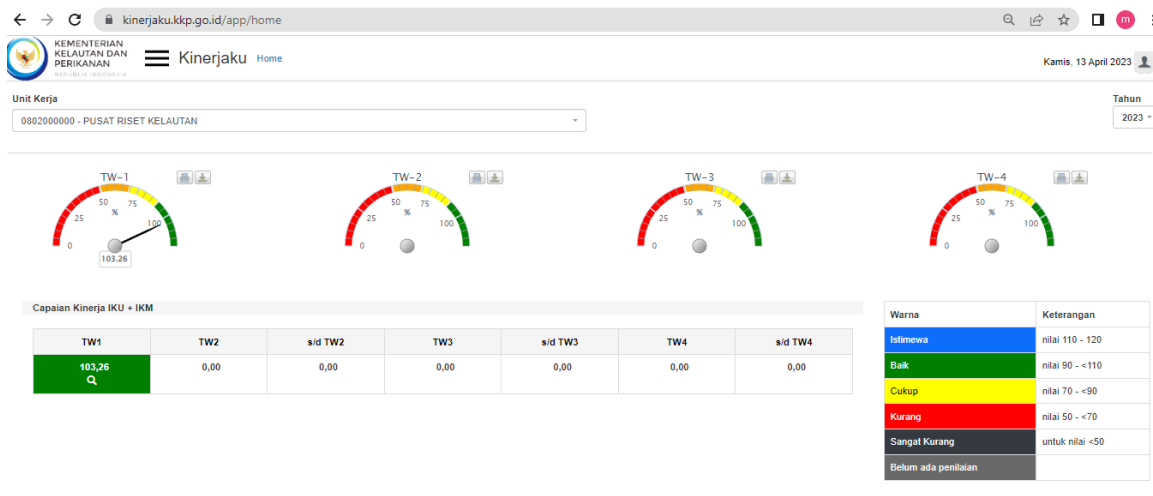
**A. PRESTASI INDIKATOR
KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2023**

**B. EVALUASI DAN ANALISIS
KINERJA**

**C. EFISIENSI SUMBER DAYA
DAN ALOKASI ANGGARAN**

A. PRESTASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Riset Kelautan Triwulan I Tahun 2023 mengalami perubahan dan penyesuaian yang mengacu pada *Balanced Score Card* (BSC). Berdasarkan penetapan target pada setiap indikator kinerja tersebut, ada indikator kinerja yang telah berhasil dicapai. Pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan I Tahun 2023 yang mengacu *Balanced Score Card* (BSC) dengan bantuan perangkat lunak berbasis *Balanced Score Card* dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh nilai capaian kinerja Pusat Riset Kelautan di tingkat korporat Triwulan I Tahun 2023 sebesar 103,26% sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 7. Nilai Capaian Kinerja Pusriskel tahun 2023

Dari hasil pengukuran kinerja Triwulan I Tahun 2023 dapat diketahui bahwa dari 14 IKU Pusat Riset Kelautan telah terdapat 3 capaian kinerja IKU sesuai dengan target yang ditetapkan, dengan nilai kinerja baik yang ditunjukkan dengan indikator berwarna hijau.

B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSS) pada Triwulan I Tahun 2023, dari 3 Sasaran Kegiatan (SK) dan 14 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Riset Kelautan menunjukkan memiliki kinerja baik (diatas target yang telah ditetapkan), ditandai dengan warna hijau sesuai dengan tabel berikut.

Tabel 8. Target dan Capaian Kinerja Pusat Riset Kelautan Triwulan I Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA		Target		Realisasi	
		2023	TW I	TW I	%
1.	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP lingkup Pusat Riset Kelautan (NSPK)	7	-	-	-
2.	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP Lingkup Pusat Riset Kelautan (unit)	3	-	-	-
3.	Nilai PNBPN Satker Lingkup Pusat Riset Kelautan (Rupiah Juta)	8,5	-	-	-
4.	Kerjasama/Kemitraan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang disepakati (naskah Kerjasama)	3	-	-	-
5.	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%)	100	100	100	100,00
6.	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Kelautan dibandingkan Realisasi Anggaran Pusat Riset Kelautan TA 2022 (%)	≤ 0,5	-	-	-
7.	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Kelautan (Indeks)	78	-	-	-
8.	Nilai PM SAKIP Pusat Riset Kelautan (nilai)	75	-	-	-
9.	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Kelautan (nilai)	192	-	-	-
10.	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Riset Kelautan (%)	92	92	100	108,70
11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Pusat Riset Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75	75	75	100,00
12.	Unit Kerja Pusat Riset Kelautan yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit kerja)	1	-	-	-
13.	Nilai IKPA satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	89	-	-	-
14.	Nilai Kinerja Anggaran Satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	82	-	-	-

Rincian pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Triwulan I Tahun 2023 yang mengacu *Balanced Score Card* (BSC) adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1

Tersedianya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP

IKU 1: Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP lingkup Pusat Riset Kelautan (NSPK)

Belum terdapat capaian kinerja pada IKU ini, capaian baru dapat diukur pada triwulan IV.

Sasaran Kegiatan 2

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan

IKU 2: Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP Lingkup Pusat Riset Kelautan (unit)

Belum terdapat capaian kinerja pada IKU ini, capaian baru dapat diukur pada triwulan IV.

Sasaran Kegiatan 3

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pusat Riset Kelautan

IKU 3: Nilai PNPB Satker Lingkup Pusat Riset Kelautan (Rupiah Juta)

Belum terdapat capaian kinerja pada IKU ini, capaian baru dapat diukur pada triwulan IV.

IKU 4: Kerjasama/Kemitraan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang disepakati (naskah Kerjasama)

Belum terdapat capaian kinerja pada IKU ini, capaian baru dapat diukur pada triwulan IV.

IKU 5: Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%)

Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan meliputi Kegiatan Layanan Tata Laksana, Kegiatan Layanan Kesekretariatan Pimpinan, Kegiatan Layanan Perkantoran, Kegiatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, serta Kegiatan Layanan Penyelenggaraan Kearsipan yang dilaksanakan pada tahun 2023.

Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal =

$$\frac{\text{Jumlah realisasi dokumen hasil layanan}}{\text{Jumlah target dokumen hasil layanan}} \times 100\%$$

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pusat Riset Kelautan Tahun 2023 ditetapkan target IKU ini adalah sebesar 100%. Capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Capaian IKU Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%)

SK- 3		Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Pusat Riset Kelautan							
IKU- 5		Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Riset Kelautan (%)							
Realisasi TW I 2020- 2022			2023					Renstra KKP 2020-2024 (PermenKP 57/2020)	
2020	2021	2022	Target	Target TW I	Realisasi TW I	% capaian	% Kenaikan TW I 2022-2023	Target 2024	% Capaian terhadap target 2024
100	100	100	100	100	100	100	-	100	100

Pada Triwulan I Tahun 2023 capaian IKU ini telah mencapai target yang ditetapkan yakni 100%, dengan persentase capaian sebesar 100%. Bila dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2022 tidak terdapat kenaikan atau penurunan capaian pada IKU ini.

Keberhasilan atas pencapaian IKU ini disebabkan oleh terlaksananya seluruh kegiatan manajerial di lingkup Pusat Riset Kelautan pada triwulan 1 dengan telah disampaikannya Laporan kegiatan manajemen internal Pusat Riset Kelautan, yakni:

1. Kegiatan Layanan Tata Laksana;
2. Kegiatan Layanan Kesekretariatan Pimpinan;
3. Kegiatan Layanan Perkantoran;
4. Kegiatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
5. Kegiatan Layanan Penyelenggaraan Kearsipan.

Kegiatan pendukung yang menunjang tercapainya IKU ini adalah terlaksananya pengelolaan barang milik negara, kesekretariatan dan operasional pimpinan, kegiatan rutin perkantoran meliputi kebutuhan sehari-hari, penyusunan dokumen pengadaan dan pengadministrasian persuratan.

IKU 6: Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Kelautan dibandingkan Realisasi Anggaran Pusat Riset Kelautan TA 2022 (%)

Belum terdapat capaian kinerja pada IKU ini, capaian baru dapat diukur pada triwulan IV.

IKU 7: Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pusat Riset Kelautan (Indeks)

Belum terdapat capaian kinerja pada IKU ini, capaian baru dapat diukur pada triwulan berikutnya.

IKU 8: Nilai PM SAKIP Pusat Riset Kelautan (Nilai)

Belum terdapat capaian kinerja pada IKU ini, capaian baru dapat diukur pada triwulan IV.

IKU 9: Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Kelautan (Nilai)

Belum terdapat capaian kinerja pada IKU ini, capaian baru dapat diukur pada triwulan IV.

IKU 10: Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Riset Kelautan (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Perhitungan indikator ini berasal dari penilaian 2 komponen, yaitu Komponen Dokumen, dan Komponen Keaktifan, dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui aplikasi *Bitrix24*.

Formula perhitungan IKU ini adalah:

$$MP_{\text{Pusat}} = \text{Nilai Pemenuhan Dokumen} + \text{Nilai Keaktifan}$$

Hasil capaian pada akhir tahun merupakan nilai rata-rata capaian pada triwulan I-IV

Konten dokumentasi kegiatan rapat/seminar/workshop/diseminasi dengan memenuhi unsur 5W1H mendapatkan **poin 0,5**;

Konten berupa karya tulis, jurnal atau penelitian sesuai dengan tugas/fungsi jabatan dengan **poin 1**;

Konten video/campaign diharapkan bersifat edukasi atau ajakan dengan **poin 3**.

- Cara Mengukur:
 - a) Menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan yang ditunjuk (*bitrix*)
 - b) Pengukuran dilakukan setiap triwulan, dengan rincian:
 - Keikutsertaan akan direkap setiap hari dalam satu triwulan
 - Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.

- Pengukuran level 1 dihitung dengan lingkup pejabat pusat
- Pusdatin menyediakan data hasil rekapan pejabat yang telah aktif pada setiap triwulan untuk diolah dan dijadikan nilai IKU MP masing-masing unit kerja eselon I.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pusat Riset Kelautan tahun 2023 ditetapkan target IKU ini adalah sebesar 92%. Capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Capaian IKU Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Riset Kelautan (%)

SK- 3		Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Pusat Riset Kelautan							
IKU- 10		Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Pusat Riset Kelautan (%)							
Realisasi TW I 2020- 2022			2023					Renstra KKP 2020-2024 (PermenKP 57/2020)	
2020	2021	2022	Target	Target TW I	Realisasi TW I	% capaian	% Kenaikan TW I 2022-2023	Target 2024	% Capaian terhadap target 2024
75,67	95,14	100	92	92	100	108,70	-	92	108,70

Pada Triwulan I Tahun 2023 capaian IKU ini telah melebihi target yang ditetapkan, yaitu 100% dengan persentase capaian 108,70%. Bila dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2022 tidak terdapat kenaikan atau penurunan capaian.

Keberhasilan atas pencapaian indikator ini disebabkan oleh pemanfaatan sistem informasi atau medis sosial berupa BitrixKKP dalam menyampaikan sharing dokumen perencanaan kinerja dan penyampaian/posting informasi, berita dan kegiatan baik riset maupun manajerial di lingkungan KKP.

Kegiatan pendukung yang menunjang tercapainya IKU ini adalah telah meng-upload dokumen perencanaan kinerja tahun 2023, diantaranya adalah Renstra 2020-2024, Manual IKU Level 2, Perjanjian Kinerja Level 2, Rencana Aksi atas PK Tahunan Level 2, Laporan Kinerja Level 2 Tahun 2022 pada media sosial tersebut serta keaktifan pegawai dalam membagikan kegiatan yang dilaksanakan pada pada SI-MP tersebut.

IKU 11: Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Pusat Riset Kelautan Yang Dokumen Tindaklanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

Jumlah rekomendasi **hasil pengawasan Itjen** yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti **secara tuntas** (status tindak lanjut adalah **TUNTAS**) oleh Pusat Riset Kelautan.

Formula perhitungan IKU ini adalah:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Pusat Riset Kelautan}} \times 100\%$$

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pusat Riset Kelautan tahun 2023 ditetapkan target IKU ini adalah sebesar 75%. Capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Pusat Riset Kelautan yang Dokumen Tindaklanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

SK- 3		Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Pusat Riset Kelautan							
IKU- 11		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Pusat Riset Kelautan Yang Dokumen Tindaklanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan (%)							
Realisasi TW I 2020- 2022			2023					Renstra KKP 2020-2024 (PermenKP 57/2020)	
2020	2021	2022	Target	Target TW I	Realisasi TW I	% capaian	% Kenaikan TW I 2022-2023	Target 2024	% Capaian terhadap target 2024
100	100	100	75	75	75	100	-25	100	100

Pada Triwulan I Tahun 2023 capaian IKU ini telah mencapai target yang ditetapkan, yakni 100% rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti dan disampaikan, dengan persentase capaian sebesar 100%. Bila dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2022 terdapat penurunan capaian sebesar 25 % dikarenakan adanya perubahan dalam penyampaian nilai capaian, namun secara nilai capaian tidak terdapat penurunan capaian. Pada tahun 2022 nilai capaian semua satuan kerja yang sudah tuntas tindak lanjutnya ataupun satuan kerja yang tidak ada temuan adalah sama yakni 100%. Pada tahun 2023 terjadi perbedaan dimana nilai capaian suatu satuan kerja yang menjadi uji petik Itjen dan sudah tuntas tindak lanjutnya adalah 100% serta nilai capaian suatu satuan kerja yang tidak ada temuan adalah sama dengan target kinerja yang ditetapkan yakni 75%.

Keberhasilan atas pencapaian indikator ini adalah tidak adanya temuan pada Pusat Riset Kelautan pada triwulan I Tahun 2023, sesuai surat penyampaian

dari BRSDM Nomor B.1962/BRSDM.1/HP.510/IV/2023 tanggal 12 April 2023 perihal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2023 Lingkup BRSDMKP”

Kegiatan pendukung yang menunjang tercapainya IKU ini adalah pengendalian intern terhadap faktor-faktor yang mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan antara lain komitmen pimpinan dalam percepatan penyelesaian temuan serta inisiasi kegiatan seperti tindak lanjut temuan dengan melakukan pendampingan ke satuan kerja dan kegiatan tindak lanjut temuan yang diadakan secara regional dengan melibatkan Tim ITJEN KKP.

IKU 12: Unit kerja Pusat Riset Kelautan yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit)

Belum terdapat capaian kinerja pada IKU ini, capaian baru dapat diukur pada triwulan IV.

IKU 13: Nilai IKPA satker Pusat Riset Perikanan

Belum terdapat capaian kinerja pada IKU ini, capaian baru dapat diukur pada triwulan berikutnya.

IKU 14: Nilai Kinerja Anggaran satker Pusat Riset Perikanan

Belum terdapat capaian kinerja pada IKU ini, capaian baru dapat diukur pada triwulan IV.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2023

Penyerapan anggaran lingkup Pusat Riset Kelautan Triwulan I Tahun 2023 data per tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp. 4.200.313.624,- dari pagu anggaran Rp. 33.650.000.000,- dengan persentase sebesar 12,48%, rincian realisasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12. Rincian Realisasi Anggaran Pusriskel Tahun 2023

Satuan Kerja (Satker)	Pagu (Rp)	Realisasi	
		Rp.	%
Pusriskel	22,687,649,000	2,563,307,364	11.30%
LRSDKP	6,429,852,000	901,267,694	14.02%
LPTK	4,532,499,000	625,724,927	13.81%
TOTAL	33,650,000,000	4,090,299,985	12.16%

Secara umum kinerja Pusat Riset Kelautan pada Triwulan I Tahun 2023 belum maksimal hal ini terlihat dari capaian realisasi anggaran yang masih dibawah 20%, dikarenakan adanya blokir anggaran belanja modal dan kegiatan Perumusan Kebijakan Kelautan Dan Perikanan, serta belum terlaksananya seluruh kegiatan berdasarkan POK. Realisasi anggaran per IKU dapat dilihat pada lampiran sedangkan realisasi anggaran per Sasaran Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13. Rincian Realisasi Per Sasaran Kegiatan Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN		Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran Per 31 Maret (Rp.)	%
1.	Tersedianya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP	2.350.000.000	0	0
2.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan	450.000.000	0	0
3.	Tatakelola Pemerintahan yang Baik pada Pusat Riset Kelautan	30.850.000.000	4,090,299,985	12.16
TOTAL		33.650.000.000	4,090,299,985	12.16

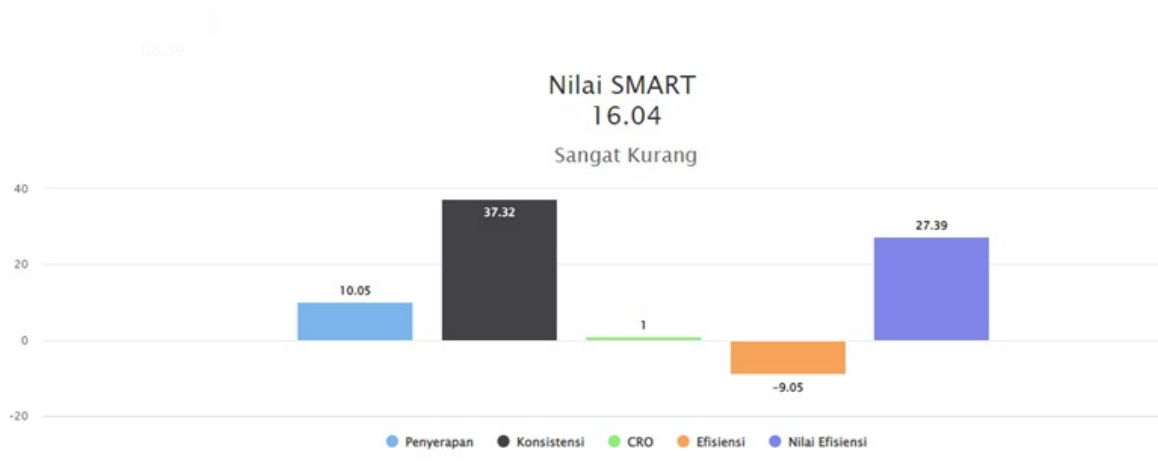
D. EFISIENSI ANGGARAN DAN ALOKASI SUMBER DAYA

Pusat Riset Kelautan merupakan satuan kerja di bawah Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Modal berupa anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan untuk mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, disamping itu anggaran dipergunakan juga sebagai alat perencana untuk mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, disamping itu anggaran dipergunakan juga sebagai alat pengendalian untuk mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga disebutkan bahwa evaluasi kinerja anggaran terdiri atas evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi, evaluasi kinerja anggaran atas aspek manfaat dan evaluasi kinerja atas aspek konteks. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilaksanakan untuk kinerja anggaran tingkat eselon I/program dan tingkat satuan kerja/kegiatan. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel: capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Nilai efisiensi tertinggi adalah 20% (dua puluh persen) dan nilai terendah adalah -20 % (minus dua puluh persen). Perhitungan efisiensi anggaran Pusat Riset Kelautan yang masuk dalam DIPA Pusat Riset Perikanan (satu DIPA) telah tersedia berbasis sistem dan dikembangkan oleh Kementerian Keuangan RI melalui aplikasi SmartDJA, yang

dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar 8. Nilai Efisiensi anggaran Triwulan I Tahun 2023

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat nilai kinerja anggaran Pusriskan memiliki nilai 16,04 dengan kategori Sangat Kurang. Dengan penyerapan 10,05%, konsistensi 37,32%, capaian rincian output (CRO) 1,00%, efisiensi -9,05%, dan nilai efisiensi 27,39%. Selain itu, terdapat 4 (empat) alur tahapan untuk mencapai efisiensi anggaran dan sumber daya pada Pusriskan yaitu; perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, serta penyesuaian. Efisiensi tersebut merupakan hasil evaluasi anggaran dan sumber daya yang akan didapatkan setelah melalui reviu anggaran maupun kinerja. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 Pusriskan belum melakukan revisi anggaran.

BAB IV PENUTUP

A. CAPAIAN KINERJA UTAMA

**B. PERMASALAHAN
REKOMENDASI**

&

A. CAPAIAN KINERJA UTAMA

Berdasarkan hasil pengukuran Aplikasi Kinerja Triwulan I Tahun 2023, pada Pusat Riset Kelautan memiliki kinerja yang baik dengan nilai 103,26%. Pengukuran capaian kinerja Pusat Riset Kelautan tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *Balanced Score Card* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Capaian kinerja telah memenuhi target yang telah ditetapkan dengan indikator capaian berwarna hijau.

Dari hasil pengukuran kinerja Pusat Riset Kelautan pada Triwulan I Tahun 2023 terdapat 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah memiliki capaian sebagai berikut:

Tabel 14. Capaian Kinerja Pusriskel Triwulan I Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA		Target		Realisasi	
		2023	TW I	TW I	%
1.	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP lingkup Pusat Riset Kelautan (NSPK)	7	-	-	-
2.	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP Lingkup Pusat Riset Kelautan (unit)	3	-	-	-
3.	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Riset Kelautan (Rupiah Juta)	8,5	-	-	-
4.	Kerjasama/Kemitraan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang disepakati (naskah Kerjasama)	3	-	-	-
5.	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%)	100	100	100	100,00
6.	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Kelautan dibandingkan Realisasi Anggaran Pusat Riset Kelautan TA 2022 (%)	≤ 0,5	-	-	-
7.	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Kelautan (Indeks)	78	-	-	-
8.	Nilai PM SAKIP Pusat Riset Kelautan (nilai)	75	-	-	-
9.	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Kelautan (nilai)	192	-	-	-
10.	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Riset Kelautan (%)	92	92	100	108,70
11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Pusat Riset Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75	75	75	100,00
12.	Unit Kerja Pusat Riset Kelautan yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit kerja)	1	-	-	-
13.	Nilai IKPA satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	89	-	-	-
14.	Nilai Kinerja Anggaran Satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	82	-	-	-

B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

Secara umum kinerja Pusat Riset Kelautan cukup baik, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perbaikan-perbaikan. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan tentu dijumpai permasalahan dan membutuhkan langkah tindak lanjut segera untuk mengatasinya. Beberapa kendala/permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan Pusat Riset Kelautan dan tindak lanjut yang diperlukan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 15. Permasalahan dan Rekomendasi

No.	Permasalahan	Rekomendasi
1.	Adanya peralihan ke mekanisme sistem kerja baru terkait Kelompok Kerja mengakibatkan belum optimalnya penyampaian data dukung kinerja oleh penanggungjawab IKU terhadap target waktu yang ditetapkan	Melakukan sosialisasi mekanisme sistem kerja baru kepada para Penanggungjawab IKU dan anggota pelaksana kegiatan mengenai uraian tugas dan tanggung jawabnya serta meminta para Penanggung jawab IKU agar dapat menyampaikan bahan dan data dukung capaian kinerja tepat waktu
2.	Belum semua IKU memiliki kegiatan pendukung dan alokasi anggaran dalam dokumen RKAKL	Melakukan revisi RKAKL dengan memasukkan kegiatan pendukung tercapainya IKU dan alokasi anggarannya

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN PUSAT RISET KELAUTAN

JALAN PASIR PUTIH II LANTAI IV ANCOL TIMUR JAKARTA 14430
TELEPON (021) 64711583 (LACAK), FAKSIMILE (021) 64711685
LAMAM www.kkp.go.id EMAIL pusriskel@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 PUSAT RISET KELAUTAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Yayan Hikmayani**
Jabatan : Plt. Kepala Pusat Riset Kelautan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **I Nyoman Radiarta**
Jabatan : Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 9 Januari 2023

Pihak Kedua
Kepala Badan Riset dan
Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan


I Nyoman Radiarta

Pihak Pertama
Plt. Kepala Pusat Riset
Kelautan


Yayan Hikmayani

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PUSAT RISET KELAUTAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tersedianya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP	1	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP Lingkup Pusat Riset Kelautan (NSPK)	7
2	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan	2	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP Lingkup Pusat Riset Kelautan (unit)	3
3	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pusat Riset Kelautan	3	Nilai PNBPN Satker Lingkup Pusat Riset Kelautan (Rupiah Juta)	8,5
		4	Kerjasama/Kemitraan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang disepakati (naskah Kerjasama)	3
		5	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%)	100
		6	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Kelautan dibandingkan Realisasi Anggaran Pusat Riset Kelautan TA 2022 (%)	≤ 0,5
		7	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Kelautan (indeks)	78
		8	Nilai PM SAKIP Pusat Riset Kelautan (nilai)	75
		9	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Kelautan (nilai)	92
		10	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Riset Kelautan (%)	92
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Pusat Riset Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75
		12	Unit Kerja Pusat Riset Kelautan yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit)	1
		13	Nilai IKPA satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	89
		14	Nilai Kinerja Anggaran Satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	82

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	<i>Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan</i>	2.800.000.000
2	<i>Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan</i>	30.850.000.000
TOTAL ANGGARAN PUSAT RISET KELAUTAN TAHUN 2023		33.650.000.000

Jakarta, 9 Januari 2023

Pihak Kedua
Kepala Badan Riset dan
Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan

I Nyoman Radiarta

Pihak Pertama
Plt. Kepala Pusat Riset
Kelautan

Yayan Hikmayani

Surat Perintah Tim Penyusun LKJ Tahun 2023



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN PASIR PUTIH II ANCOL TIMUR JAKARTA 14430
TELEPON (021) 64711583 (LACAK), FAKSIMILE (021) 64711685
LAMAN www.kkp.go.id

SURAT PERINTAH
PLT. KEPALA PUSAT RISET KELAUTAN
NOMOR :B.266/BRSDM.2/TU.110/III/2023

TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKj)
PUSAT RISET KELAUTAN
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PLT. KEPALA PUSAT RISET KELAUTAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terselenggaranya *good governance* dan *clean governance* dalam rangka tata pemerintahan yang baik sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara maka perlu adanya Laporan Kinerja (LKj) Triwulan dan Tahunan.
 - b. bahwa berdasar pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Surat Perintah Plt. Kepala Pusat Riset Kelautan tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Pusat Riset Kelautan Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP.

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT PERINTAH PLT. KEPALA PUSAT RISET KELAUTAN TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKj) PUSAT RISET KELAUTAN TAHUN 2023
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Kepala Pusat Riset Kelautan Tahun 2023 terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini,
- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Pusat Riset Kelautan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. Penanggung Jawab :
Memberikan pembinaan terhadap kegiatan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pusat Riset Kelautan Tahun 2023;
 2. Ketua :
Memberikan arahan terhadap kegiatan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pusat Riset Kelautan Tahun 2023;

3. Sekretaris :

Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pusat Riset Kelautan Tahun 2023;

4. Anggota :

Menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan serta menyusun Laporan Kinerja (LKj) Pusat Riset Kelautan Tahun 2023.

KETIGA Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Pusat Riset Kelautan Tahun 2023, bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Riset Kelautan.

KEEMPAT Masa kerja berlaku Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Pusat Riset Kelautan Tahun 2023 sebagaimana diktum PERTAMA selama 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan keputusan ini.

KELIMA Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pusat Riset Perikanan Tahun 2023 Nomor SP DIPA 032.12.403821/2023 Tanggal 30 November 2022.

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Maret 2023

PLT KEPALA PUSAT RISET KELAUTAN



YAYAN LIK MAYANI

LAMPIRAN : Surat Perintah PLT. Kepala Pusat Riset Kelautan Tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Pusat Riset Kelautan Tahun 2023

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKj)
PUSAT RISET KELAUTAN
TAHUN 2023**

Penanggung Jawab : Plt. Kepala Pusat Riset Kelautan
Ketua : Dr. Ifan Ridlho Suhelmi, M.Si.
Sekretaris : Joko Hardono, S.Si, ME.
Anggota : Erish Widjanarko, S.T.
Triyono, S.Si, M.T.
Theresia Lolita N., M.Si.
Nia Naelul Hasanah R., M. Soc.,Sc.
Efi Noferya, S.Pi.
Rais Rozali, S.H, M.H.
Arid Ahmad Ridwan, SE.
Yulhendri Suryansyah, S.Pi, M.Si
Dr. Niken F. Gusmawati, M.Si.
Dra. Yayah Shobariyah
Drs. B. Realino S, M.Si.
Falia Maumentia, LL.M.
Cecep Ahmad H, S.T, M.Eng.
M. Hikmat Jayawiguna, S.St.Pi, M.Si.
Sitti Khadijah Nurhappy, S.Pi, M.T.
Donal Daniel, S.T, M.T.
R. Tri Anggono T. Pranoto, A.Md.
Adi Darmawan, S.Kom.
Sari Novita, S.T.
Utami Retno Kadarwati, M.Sc.
Megananda, SE

PLT. KEPALA PUSAT RISET KELAUTAN



Realisasi Anggaran Per IKU Pusat Riset Kelautan

Per 31 Maret 2023

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase (%)
1.	Tersedianya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP	1 Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan KP lingkup Pusat Riset Kelautan (NSPK)	2,350,000,000	-	0.00%
2.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan	2 Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP Lingkup Pusat Riset Kelautan (unit)	450,000,000	-	0.00%
3.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pusat Riset Kelautan	3 Nilai PNBPsatker Lingkup Pusat Riset Kelautan (Rupiah Juta)	139,858,000	300,000	0.21%
		4 Kerjasama/Kemitraan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang disepakati (naskah Kerjasama)	106,788,000	21,569,470	20.20%
		5 Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%)	29,707,854,000	3,863,358,289	13.00%
		6 Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Kelautan dibandingkan Realisasi Anggaran Pusat Riset Kelautan TA	98,428,000	49,182,618	49.97%

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase (%)
		2022 (%)			
7		Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Kelautan (Indeks)	145,000,000	27,675,605	19.09%
8		Nilai PM SAKIP Pusat Riset Kelautan (nilai)	261,800,000	55,098,578	21.05%
9		Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Kelautan (nilai)	59,380,000	24,247,312	40.83%
10		Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Pusat Riset Kelautan (%)	75,500,000	2,690,000	3.56%
11		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Pusat Riset Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	29,572,000	7,819,589	26.44%
12		Unit Kerja Pusat Riset Kelautan yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit kerja)	75,000,000	785,500	1.05%
13		Nilai IKPA satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	77,000,000	17,534,692	22.77%
14		Nilai Kinerja Anggaran Satker Pusat Riset Perikanan (nilai)	73,820,000	20,038,332	27.14%
TOTAL			33,650,000,000	4,090,299,985	12.16%



PUSAT RISET KELAUTAN

**Jalan Pasir Putih II Ancol Timur
Jakarta 14430**

**Telepon (021) 64711583, Faksimile (021) 64711685
LAMAM www.kkp.go.id**